



20
21

LAPORAN KINERJA PUSAT PENELITIAN

Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penelitian (Puslit) tahun 2021. LKj ini disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai alat penilaian kinerja, LKj Puslit ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi Puslit dalam memberikan pelayanan serta dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Laporan ini juga merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Puslit. Analisis dan evaluasi objektif dalam laporan kinerja Puslit diharapkan dapat mendorong terwujudnya optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja para pejabat dan pegawai di lingkungan Puslit di masa yang akan datang.

LKj tahun 2021 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Puslit berdasarkan Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021. Capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan Puslit tahun 2021 masing-masing mencapai 100% dan 97%. Upaya mencapai kinerja tersebut tidak terlepas dari tantangan besar Puslit pada tahun ini diantaranya, masih tingginya kasus *Coronavirus Disease (Covid-19)* sampai pertengahan tahun 2021 dan adanya pemotongan anggaran Puslit yang cukup signifikan untuk mendukung program *refocusing* anggaran pemerintah. Untuk itu, Puslit sangat bersyukur bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dan alokasi

anggaran yang tersedia dapat dilaksanakan dan dipergunakan secara optimal. Capaian kinerja ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan segenap pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan Puslit pada tahun 2021.

Kami berharap melalui LKj ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang rinci, jelas, dan transparan mengenai capaian kinerja Puslit dengan segala potensi, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun ini. Selain itu, kami juga berharap LKj ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penyusunan, perumusan kebijakan dan rencana kerja pada masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Pusat Penelitian

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahannya yang terakhir, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan landasan hukum pembentukan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bagian dari pengembangan sistem pendukung bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal tersebut direalisasikan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka dibentuk Pusat Penelitian (Puslit) yang merupakan Unit Kerja Eselon II dan berada di bawah Badan Keahlian DPR RI.

Tugas Puslit adalah melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Puslit dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu sebanyak 85 orang peneliti dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

Sesuai amanat dalam Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 maka setiap unit Eselon II perlu menyusun suatu perencanaan tahunan untuk mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Perjanjian

Kinerja Puslit yang menjadi kontrak kerja Puslit terhadap Badan Keahlian DPR RI tahun 2021.

Tabel. Pengukuran Kinerja Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	KineKinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan	Persentase hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , dan Prosiding Seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian	3,22	3,27	101,55%
	Persentase realisasi anggaran Pusat Penelitian	92,5%	97,43%	105,33%

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

Upaya pemulihan kondisi negara karena adanya Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) merupakan tantangan tersendiri bagi Puslit untuk melaksanakan perjanjian kinerja yang telah dikontrakkan di awal tahun 2021. Kondisi tersebut tidak menyurutkan kinerja Puslit, untuk merealisasikan seluruh perjanjian kinerja yang telah dikontrakkan. Pencapaian tersebut tentunya karena komitmen dan kerjasama seluruh individu di Puslit dan dukungan kerjasama antarunit organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Indikator kinerja yang *pertama*, yaitu Persentase hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*, dan Prosiding Seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Berdasarkan laporan diketahui bahwa target pencapaian akuntabilitas tahun 2021 terhadap indikator kinerja utama (IKU) Puslit telah berhasil terealisasi seluruhnya sebanyak 100%.

Indikator kinerja yang *kedua*, yaitu Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian. Indeks indikator kinerja ini ditargetkan sebesar 3,22 dan tercapai sesuai target. Indikator kinerja ini diukur melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan, dimana yang menjadi responden adalah anggota DPR RI periode 2019-2024. Berdasarkan hasil survei

Tingkat Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen Tahun 2020, Puslit memperoleh indeks kepuasan dengan Nilai Interval 3,27 atau Nilai Interval Konversi 81,76 dengan kategori Baik. Artinya tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah diberikan Puslit dinilai baik

Indikator kinerja yang *ketiga*, yaitu Persentase Realisasi Anggaran Pusat Penelitian. Realisasi indikator ini ditargetkan sebesar 92,5% dan terealisasi sebesar 97,43%. Dengan demikian capaian indikator ini melebihi target yaitu sebesar 105,33%.

Seluruh kegiatan atau program yang dilakukan di Puslit didukung oleh anggaran yang cukup memadai meskipun telah dilakukan pemotongan anggaran akibat adanya realokasi dan *refocusing* anggaran untuk kepentingan penanggulangan pandemi Covid-19. Anggaran yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja Puslit sepanjang periode tahun 2021 adalah sebesar Rp10.905.740.000. Puslit mampu mencapai kinerjanya yang tinggi dengan menggunakan anggaran sebesar Rp10.625.191.302 (97,43% dari total anggaran). Berdasarkan hal tersebut, Puslit telah melakukan penghematan anggaran senilai Rp280.548.698. Target dan realisasi anggaran Puslit lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel Anggaran Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021**

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
10.905.740.000	10.625.191.302	97,43

Sumber: Pusat Penelitian, 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR.....	10
DAFTAR SINGKATAN.....	12
BAB I. PENDAHULUAN	14
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	14
B. PERMASALAHAN	19
1. SUMBER DAYA MANUSIA	19
2. PERUBAHAN KEBIJAKAN TENTANG LEMBAGA RISET DAN KEBERADAAN BRIN.....	21
3. SARANA DAN PRASARANA.....	22
4. SINKRONISASI KEGIATAN DENGAN PK DAN DIPA.....	23
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	25
A. RENCANA STRATEGIS.....	25
1. VISI.....	25
2. MISI.....	27
3. TUJUAN.....	28
4. SASARAN	28
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	29
BAB III. PENGUKURAN KINERJA	33
A. PENGUKURAN KINERJA PUSAT PENELITIAN.....	33
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN.....	35
1. PENELITIAN.....	36

2.	JURNAL ILMIAH.....	38
3.	BUKU.....	50
4.	INFO SINGKAT.....	53
5.	<i>PARLIAMENTARY REVIEW</i>	56
6.	<i>WEBSITE</i> PUSAT PENELITIAN	58
7.	SEMINAR NASIONAL	62
8.	ISU SEPEKAN	63
C.	EVALUASI DAN ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PUSAT PENELITIAN	66
D.	KINERJA ANGGARAN	70
	BAB IV. PENUTUP	77
	LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Pusat Penelitian Tahun 2021.....	15
Tabel 2.	Jumlah Peneliti pada Pusat Penelitian per Bidang Tahun 2021.....	16
Tabel 3.	Tingkat Pendidikan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2021.....	17
Tabel 4.	Jenjang Kepangkatan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2021	19
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Tahun 2021.....	30
Tabel 6.	Pengukuran Kinerja Pusat Penelitian Tahun 2021.....	34
Tabel 7.	Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan Pusat Penelitian Tahun 2021.....	34
Tabel 8.	Rekapitulasi Produk Pusat Penelitian Tahun 2021.....	35
Tabel 9.	Hasil Survei Berdasarkan Fraksi.....	67
Tabel 10.	Hasil Survei Berdasarkan Periode Responden Menjadi Anggota DPR RI.....	68
Tabel 11.	Anggaran Pusat Penelitian Tahun 2021.....	70
Tabel 12.	Anggaran Kegiatan Puslit Tahun 2021.....	72
Tabel 13.	Realisasi Kegiatan dan Anggaran Pusat Penelitian Tahun Anggaran 2021.....	77
Tabel 14.	Realisasi Anggaran Anggaran Pusat Penelitian Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020, dan 2021.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Peneliti pada Pusat Penelitian per Bidang Tahun 2021	16
Gambar 2.	Tingkat Pendidikan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2020.....	17
Gambar 3.	Jenjang Kepangkatan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2021.....	18
Gambar 4.	Struktur Organisasi Pusat Penelitian.....	19
Gambar 5.	Revisi Anggaran Puslit Tahun 2020.....	31
Gambar 6.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	38
Gambar 7.	Alur Pengelolaan Naskah pada Jurnal JNH.....	39
Gambar 8.	Jurnal Negara Hukum	40
Gambar 9.	Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik	42
Gambar 10.	Jurnal Aspirasi.....	44
Gambar 11.	Jurnal Politica	46
Gambar 12.	Alur Penerbitan Jurnal Politica.....	47
Gambar 13.	Proses akreditasi Politica.....	47
Gambar 14.	Jurnal Kajian	49
Gambar 15.	Alur Penerbitan Info Singkat.....	54
Gambar 16.	Info Singkat.....	55
Gambar 17.	<i>Parliamentary Review</i>	57
Gambar 18.	Tugas Tim Pengelola <i>Website</i> Pusat Penelitian.....	59
Gambar 19.	Kegiatan Seminar Puslit 2021.....	62
Gambar 20.	Alur Pengerjaan Isu Sepekan.....	65
Gambar 21.	Isu Sepekan.....	71
Gambar 22.	Target dan Realisasai Anggaran Puslit Tahun 2021.....	70
Gambar 23.	Perbandingan Anggaran, Realisasi dan Capaian	

	Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.....	73
Gambar 24.	Komposisi Anggaran Kajian Kedewanan Tahun 2021.....	74
Gambar 25.	Komposisi Anggaran Kebijakan Pusat Penelitian Tahun 2021.....	74

DAFTAR SINGKATAN

No.	Singkatan	Penjelasan
1.	AKD	Alat Kelengkapan Dewan
2.	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
3.	DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4.	FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
5.	IKAPI	Ikatan Penerbit Indonesia
6.	IKU	Indikator Kinerja Utama
7.	KTI	Karya Tulis Ilmiah
8.	LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
9.	OJS	<i>Open Journal System</i>
10.	P3DI	Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi
11.	Puslit	Pusat Penelitian
12.	Renstra	Rencana Strategis
13.	RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
14.	RKT	Rencana Kinerja Tahunan
15.	RUU	Rancangan Undang-Undang
16.	SDM	Sumber Daya Manusia
17.	Setjen	Sekretariat Jenderal
18.	SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
19.	TKP	Tim Koordinasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan Keahlian DPR RI yang diatur dengan Peraturan Presiden. Pembentukan Badan Keahlian DPR RI ini diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan keahlian terhadap DPR RI.

Untuk melaksanakan amanat UU No. 17 Tahun 2014 tersebut, ditetapkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang pembentukan Badan Keahlian DPR RI. Peraturan Presiden tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan lembaga legislatif. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020, diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Badan Keahlian DPR RI terdiri atas: (1) Pusat Penelitian; (2) Pusat Perancangan Undang-Undang; (3) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; (4) Pusat Kajian Anggaran; (5) Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara; (6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan (7) Bagian Tata Usaha Badan Keahlian.

Selanjutnya diatur bahwa Pusat Penelitian (Puslit) mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puslit menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Puslit; (b) perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Puslit; (c) perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puslit; (d) koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Puslit; (e) penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian; (f) pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian; (g) pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian; (h) pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian; (i) pelaksanaan tata usaha Puslit; (j) penyusunan laporan kinerja Puslit; dan (k) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) di Puslit yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional (peneliti), dibantu oleh Subbagian Tata Usaha. Komposisi SDM Puslit secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Pusat Penelitian Tahun 2021

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Pusat	1
2.	Peneliti	83
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
4.	Staf Tata Usaha	5
5.	Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri	4
Jumlah		94

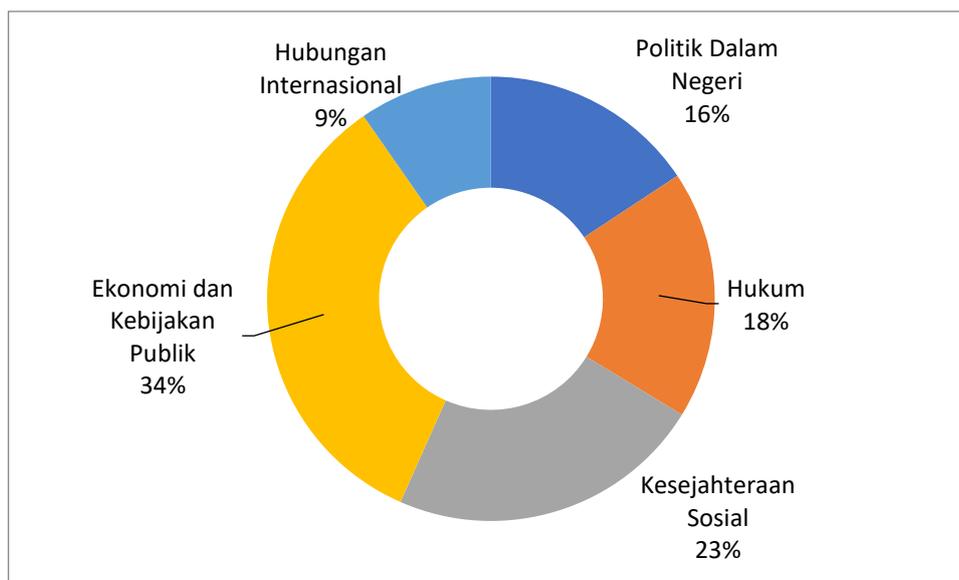
Sumber: Puslit, 2021.

Selanjutnya, kelompok jabatan fungsional peneliti yang berjumlah 83 orang tersebut dikelompokkan ke dalam lima bidang seperti terlihat pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Tabel 2. Jumlah Peneliti pada Pusat Penelitian per Bidang Tahun 2021

No.	Bidang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Politik Dalam Negeri	13	15,66
2.	Hukum	15	18,07
3.	Kesejahteraan Sosial	19	22,89
4.	Ekonomi dan Kebijakan Publik	28	33,73
5.	Hubungan Internasional	8	9,64
Jumlah		83	100,00

Sumber: Puslit, 2021.



Sumber: Puslit, 2021.

Gambar 1. Jumlah Peneliti pada Pusat Penelitian per Bidang Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak terdapat penambahan SDM peneliti. Terakhir penambahan SDM terjadi pada tahun 2019, di mana Puslit memperoleh 9 orang sebagai calon peneliti dan telah dilantik menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 1 April 2020.

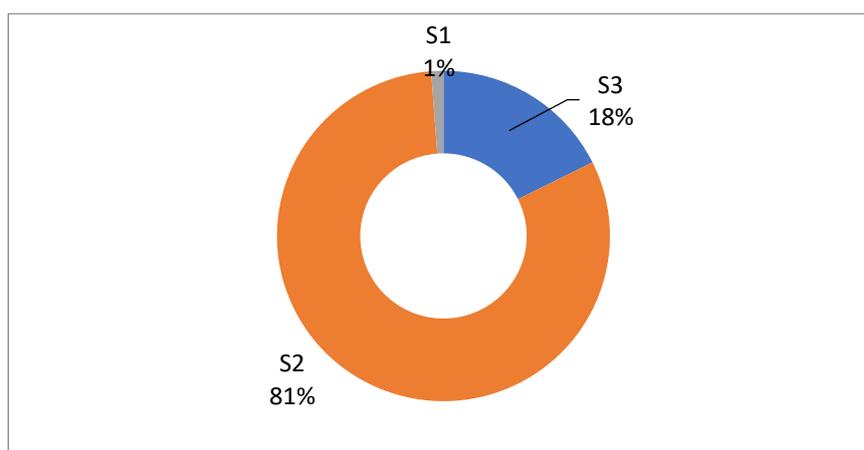
Dilihat dari aspek kualitas, sebagian besar peneliti berpendidikan Strata 2 (S2). Hingga saat ini terdapat 15 orang yang bergelar doktor (S3) dan terdapat 1 orang berpendidikan Strata 1 (S1). Tingkat pendidikan para peneliti Puslit dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 2.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	S3	15	18,07
2.	S2*)	67	80,72
3.	S1	1	1,20
	Jumlah	83	100,00

Sumber : Puslit, 2021.

Keterangan *) : 5 orang sedang menyelesaikan S3 di beberapa perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.



Sumber: Puslit, 2021.

Gambar 2. Tingkat Pendidikan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2021

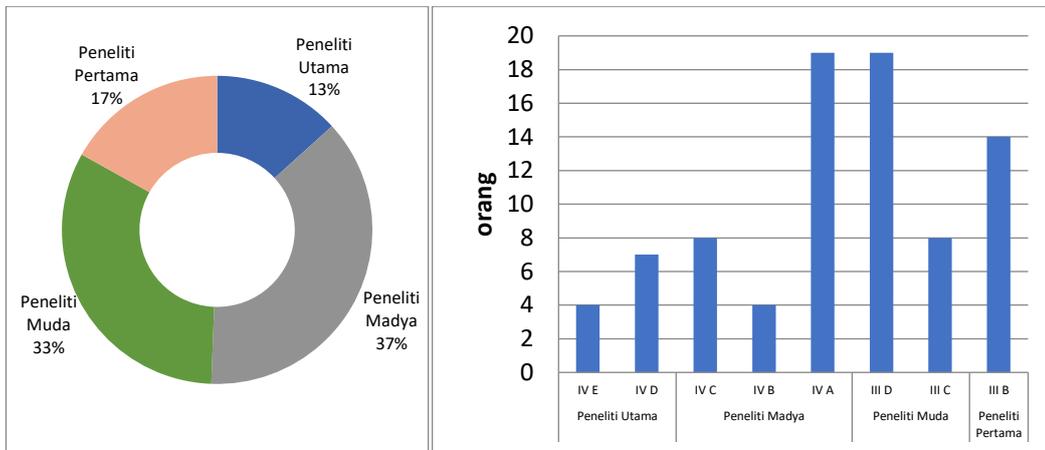
Sebagaimana kelompok jabatan fungsional lain, peneliti juga memiliki jenjang kepangkatan tertentu sesuai ketentuan berlaku. Puslit memiliki 11 orang Peneliti Utama (tiga di antaranya Profesor Riset), 32 orang Peneliti Madya, 28 orang Peneliti Muda, dan 14 orang Peneliti Pertama (Tabel 4).

Tabel 4. Jenjang Kepangkatan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2021

No.	Jabatan Peneliti	Golongan	Jumlah (Orang)
-----	------------------	----------	----------------

1.	Peneliti Utama	IV E	4
		IV D	7
2.	Peneliti Madya	IV C	8
		IV B	4
		IV A	19
3.	Peneliti Muda	III D	19
		III C	8
4.	Peneliti Pertama	III B	14
Jumlah			83

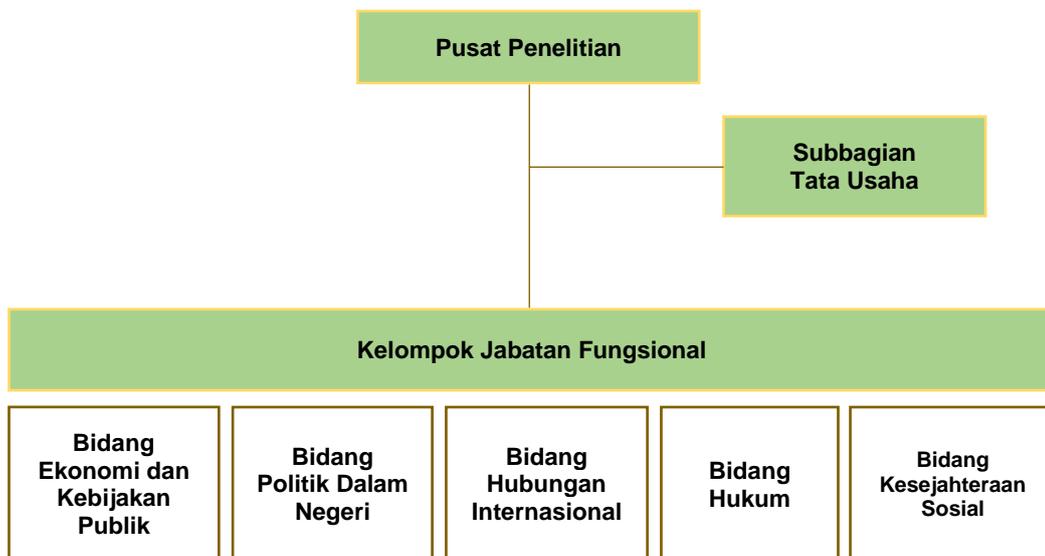
Sumber: Puslit, 2021.



Sumber: Puslit, 2021.

Gambar 3. Jenjang Kepangkatan Peneliti pada Pusat Penelitian Tahun 2021

Selanjutnya, secara kelembagaan Puslit memiliki struktur sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2015 seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Pusat Penelitian

B. Permasalahan

1. Sumber Daya Manusia

Secara historis, keberadaan peneliti di Puslit telah dirintis sejak tahun 1990. Pada saat itu peneliti dikelompokkan ke dalam sebuah unit kerja, yaitu Bidang Pengkajian dan Analisis dan berada di bawah koordinasi Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I). Seiring dengan terjadinya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, P3I beberapa kali berganti nama (nomenklatur), yaitu Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi pada tahun 1995; sejak tahun 2005, menjadi Bidang Pengkajian yang berada di bawah Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI), dan saat ini menjadi Pusat Penelitian (Puslit).

Meskipun nama mengalami pergantian beberapa kali, lebih dari dua dasa warsa ternyata penambahan jumlah peneliti sangat lambat karena adanya kebijakan *zero growth* dalam penerimaan pegawai. Pada awalnya jumlah peneliti sebanyak 16 orang. Jumlah ini berturut-turut meningkat menjadi 60 orang (tahun 2009) dan 81 orang (tahun 2013). Akan tetapi pada tahun 2014 jumlah ini berkurang lagi menjadi 77 orang karena ada 1 orang

peneliti yang mengajukan pensiun dini, 1 orang peneliti yang meninggal dunia, 1 orang peneliti pindah instansi, dan 1 orang peneliti lainnya berhenti dari jabatan peneliti. Sementara itu, pada tahun 2018 Puslit memperoleh tambahan calon peneliti sebanyak 5 orang yang telah ditetapkan sebagai PNS dan dilantik menjadi Peneliti Pertama. Demikian pula, pada 2019 terdapat penambahan 9 orang Peneliti Pertama dan 4 orang staf pengelola data di Bagian Tata Usaha Puslit. Pada tahun 2021, 1 orang peneliti mengundurkan diri, sehingga total peneliti Puslit hingga akhir tahun 2020 berjumlah 83 orang.

Apabila dilihat secara kualitas, yang antara lain melalui tingkat pendidikan maka kualifikasi dan kompetensi para peneliti sudah cukup memadai. Namun apabila dilihat dari kuantitas dan komposisi per bidang, jumlahnya belum merata, sehingga jumlah peneliti Puslit masih perlu ditambah, agar dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada DPR RI. Penambahan jumlah peneliti diharapkan dapat menghasilkan perbandingan yang lebih proporsional antara jumlah peneliti dengan jumlah Anggota DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI (AKD). Di samping itu, penambahan jumlah peneliti diperlukan agar komposisi dalam setiap bidang lebih berimbang dan sesuai dengan kebutuhan DPR RI. Kualifikasi peneliti juga perlu semakin diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI.

Untuk mengoptimalkan dukungan keahlian kepada DPR RI, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan idealnya jumlah peneliti pada Puslit sebanyak 150 orang, dengan latar belakang seluruh disiplin ilmu yang dibutuhkan, seperti ilmu sosial, ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan lain-lain secara proporsional. Jumlah tersebut didasarkan pada kebutuhan pembedaan di setiap AKD dan Pimpinan DPR RI sehingga dapat dicapai rasio ideal antara jumlah peneliti dengan jumlah Anggota DPR RI, yaitu satu orang peneliti melayani 4 orang Anggota DPR RI (1:4).

2. Perubahan Kebijakan tentang Lembaga Riset dan Keberadaan BRIN

Permasalahan yang dihadapi oleh peneliti sejak Puslit dibentuk pada tahun 1990 hingga saat ini tidak pernah berubah. Di satu sisi, sebagai SDM Puslit, peneliti harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *supporting system* dalam dukungan keahlian bagi DPR RI. Namun di sisi lain, sebagai seorang peneliti, harus dapat mengumpulkan angka kredit dalam jumlah tertentu untuk kepentingan kenaikan pangkatnya. Hal ini terkadang merugikan peneliti, karena *output* yang dihasilkan ketika peneliti menjalankan fungsi dukungan keahlian tidak selalu memiliki angka kredit yang dibutuhkan oleh peneliti.

Di tengah kesulitan yang telah dihadapi oleh peneliti selama bertahun-tahun tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2019 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisanasiptek). Dalam Pasal 48 ayat (1) UU Sisanasiptek dinyatakan bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.

Berdasarkan pasal tersebut kemudian pada tanggal 28 April 2021 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional Peraturan yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres tentang BRIN), karena dalam peraturan sebelumnya masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi nasional yang mendasarkan pada Haluan Ideologi Pancasila.

Pasal 65 ayat (1) Perpres tentang BRIN menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan

kewenangan BRIN. Selanjutnya Pasal 65 ayat (2) diatur bahwa pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut diikuti dengan dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan, dan aset BRIN.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Menteri PAN dan RB menerbitkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor B/601/M.SM.02.03/2021, tanggal 7 Desember 2021 perihal Pengalihan PNS yang Melaksanakan Fungsi Litbangjirap dalam Jabatan Fungsional Peneliti, Perekayasa, dan Teknisi Litkayasa pada Kementerian/Lembaga ke BRIN yang dtujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian/Lembaga Instansi Pusat.

Sebagai lembaga yang melaksanakan litbangjirap, Puslit juga harus mengikuti segala ketentuan tersebut di atas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Puslit, karena menjadi momen untuk melakukan reposisi dan reorganisasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai *supporting system* di bidang keahlian bagi DPR RI.

3. Sarana dan Prasarana

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 turut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Puslit. Kebijakan *work from home* (WFH) menyebabkan pekerjaan banyak dikerjakan dari rumah. Hal itu membutuhkan sarana kerja yang memadai. Hingga saat ini sebagian besar peneliti masih lebih banyak menggunakan *laptop* milik pribadi untuk melaksanakan tugas dari rumah. Oleh karena itu masih dibutuhkan penambahan *laptop* untuk peneliti yang berjumlah 83 orang.

Selain itu, beberapa permasalahan sarana dan prasarana yang masih dihadapi hingga saat ini antara lain:

- (1) Ketersediaan ruang kerja peneliti belum berorientasi kepada kebutuhan penambahan jumlah peneliti,
- (2) Pengadaan fasilitas komputer/*laptop* serta *printer* dan *scanner* yang sangat terbatas. Selain itu, komputer/*laptop* serta *printer* masih berbeda-beda standar kualitasnya,
- (3) Masih kurangnya akses data dan informasi dari lembaga-lembaga lain, terutama lembaga penelitian,
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, peneliti memerlukan data dari Bidang Arsip dan Museum serta Bidang Data dan Informasi. Oleh karena itu Puslit membutuhkan dukungan dari Pusat Teknologi dan Informasi Setjen DPR RI, sehingga peneliti dapat melaksanakan tugasnya secara lebih optimal,
- (5) Fasilitas berlangganan jurnal *online*, terutama jurnal dari luar negeri masih sangat terbatas, dan
- (6) Ketersediaan jumlah toilet yang masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai.

4. Sinkronisasi Kegiatan dengan PK dan DIPA

Selama ini banyak kegiatan peneliti yang tidak ada di PK maupun DIPA namun kegiatan tersebut harus dilaksanakan oleh peneliti, misalnya pendampingan peneliti dalam kegiatan di AKD dan berbagai tim yang dibentuk oleh DPR RI maupun unit-unit kerja yang ada di lingkungan Setjen DPR RI, penyusunan pidato, sambutan, makalah, dan *keynote speech* untuk Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Setjen DPR RI, serta beberapa kegiatan ilmiah lainnya. Ke depan kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya dapat dimasukkan ke dalam PK maupun DIPA, karena kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya oleh para peneliti.

BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA



BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi Puslit sejalan dengan Visi Badan Keahlian DPR RI yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020-2024. Secara mendasar, visi Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi visi bagi Badan Keahlian. Adapun visi Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI memiliki visi sebagai berikut:

Menjadi Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern dalam mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Profesional ditujukan pada Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI. Sedangkan yang dimaksud dengan **modern** adalah mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Visi tersebut merupakan cerminan dari cita-cita dan harapan Setjen DPR RI untuk menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan serta mewujudkan lingkungan kerja yang memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. SDM di lingkungan Setjen DPR RI juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Untuk mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Badan Keahlian perlu menyusun visi yang selaras dengan visi Sekretariat Jenderal DPR RI dan merupakan gambaran keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan di tahun 2024. Dalam mendukung visi DPR RI, maka

Badan Keahlian sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi sebagai berikut:

Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, dan Akuntabel

Badan Keahlian yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keahlian mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia.

Badan Keahlian yang andal mempunyai makna bahwa Badan Keahlian mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Badan Keahlian yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Badan Keahlian mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Badan Keahlian untuk menjadi unit kerja yang berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang good and clean governance sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

2. Misi

Untuk mewujudkan dan mendukung tercapainya visi diperlukan upaya untuk menjembatani antara Visi dan tujuan institusi. Adapun Misi Setjen DPR RI adalah:

- 1. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,*
- 2. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan*
- 3. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

Sebagai salah satu unsur di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI yang berperan dalam memberikan dukungan keahlian, Badan Keahlian menetapkan misi yang pada hakikatnya merupakan upaya penjabaran Visi Badan Keahlian DPR RI agar lebih fokus dan terarah dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, tanggung jawab pokok, dan kelembagaan yang berlangsung selama ini. Oleh karena itu, misi tersebut memuat tujuan keberadaan organisasi Badan Keahlian atau tugas utamanya, yaitu:

- 1. Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.*
- 2. Menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.*

3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Badan Keahlian menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai, yaitu:

- 1. Tercapainya dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.*
- 2. Tercapainya tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.*

Sementara, tujuan Puslit adalah:

- 1. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih,*
- 2. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap, dan*
- 3. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

4. Sasaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 3 sasaran yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Setjen DPR RI pada akhir periode perencanaan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,*
2. *Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan*
3. *Terlaksanannya Keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik*

Untuk mendukung sasaran program Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut, maka sasaran program yang akan disusun oleh Badan Keahlian harus selaras. Semua program dan kegiatan di lingkungan Badan Keahlian juga masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen. Adapun sasaran program dari Badan Keahlian adalah:

1. *Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian DPR RI*
2. *Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas*

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran dari program Puslit selanjutnya dijabarkan secara lebih luas ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Puslit. RKT akan menjadi dasar menyusun penetapan kinerja atau perjanjian kinerja yang berisi sasaran, kegiatan, indikator kinerja, dan target berdasarkan ketersediaan anggaran dan prioritas kegiatan Puslit. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Puslit telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021. Perjanjian kinerja Puslit tersebut berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja

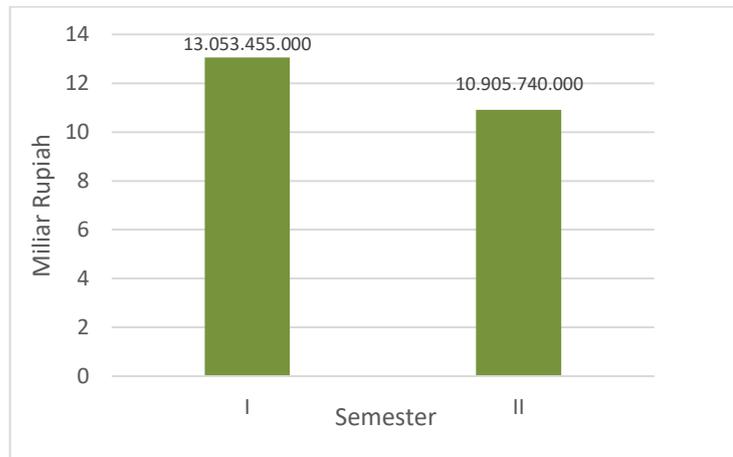
yang akan dicapai sepanjang periode tahun 2021. Setiap sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja tersebut kemudian diukur tingkat keberhasilan atau kegagalannya pada akhir periode tahun 2021. Perjanjian kinerja Puslit pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan	1. Persentase hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , dan Prosiding Seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%
	2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian	3,22
	3. Persentase realisasi anggaran Pusat Penelitian	92,5%

Sumber: Puslit, 2021.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tersebut tentunya membutuhkan anggaran. Pada dokumen perjanjian kinerja, dialokasikan dana untuk kegiatan Puslit dengan pagu anggaran sebesar Rp13.053.455.000. Namun dengan adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, di mana sebagian anggaran Setjen DPR RI dialihkan ke pemerintah pusat guna penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19, maka anggaran Puslit juga mengalami *refocusing* dan realokasi. Setelah mengalami revisi pada Semester II, anggaran Puslit menjadi Rp10.905.740.000 (Gambar 5).



Sumber: Puslit, 2021.

Gambar 5. Perubahan Pagu Anggaran Puslit 2021

BAB III

PENGUKURAN KINERJA



BAB III. PENGUKURAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Pusat Penelitian

Pengukuran tingkat capaian kinerja Puslit dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara kuantitatif, rata-rata capaian kinerja puslit melebihi 100% akan tetapi bila dilihat secara kualitas tentunya masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Bila dilihat dari sisi anggaran, anggaran Puslit tahun 2021 meningkat sebesar 0,79%. Bila dibandingkan dengan pagu anggaran di Perjanjian Kinerja, anggaran mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 19,79%. Penurunan ini merupakan dampak dari *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Meskipun demikian, penurunan anggaran ini tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan Puslit. Dengan anggaran yang terbatas Puslit tetap bisa merealisasikan kegiatan yang semula akan didanai dengan anggaran sebesar Rp 13.053.455.000.

Pada Tabel 6 dan Tabel 7 disajikan pengukuran tingkat capaian kinerja Puslit tahun 2021 dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Pusat Penelitian Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan	1. Persentase hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , dan Prosiding Seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%
	2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian	3,22	3,27	101,55%
	3. Persentase realisasi anggaran Pusat Penelitian	92,5%	97,43%	105,33%

Sumber: Puslit, 2021.

Tabel 7. Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan Pusat Penelitian Tahun 2021

Kegiatan	Rencana	Realisasi	Capaian
1. Persentase hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, Parliamentary Review, dan Prosiding Seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%
2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian	3,22	3,27	101,55%
3. Persentase realisasi anggaran Pusat Penelitian	92,5%	97,43%	105,33%
Keuangan	Rp10.905.740.000	Rp10.625.191.302	97,43%

Sumber: Puslit, 2021.

Pengukuran kinerja Puslit tahun 2021 dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada Tabel 6. Pada akhir tahun 2021, Puslit telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan. Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam 3 indikator kinerja yang akan dijabarkan berikut ini.

A. Indikator kinerja yang *pertama*, yaitu Persentase hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, Parliamentary Review, dan Prosiding Seminar yang

dimanfaatkan oleh DPR RI (Tabel 8) menunjukkan bahwa target pencapaian akuntabilitas tahun 2021 terhadap indikator kinerja utama (IKU) Puslit telah berhasil terealisasi seluruhnya sebanyak 100%.

- B. Indikator kinerja yang *kedua*, yaitu Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian. Indeks indikator kinerja ini ditargetkan sebesar 3,22 dan tercapat sesuai target. Indikator kinerja ini diukur melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan, dimana yang menjadi responden adalah anggota DPR RI periode 2019-2024.
- C. Indikator kinerja yang *ketiga*, yaitu Persentase Realisasi Anggaran Pusat Penelitian. Realisasi indikator ini ditargetkan sebesar 92,5% dan terealisasi sebesar 97,43%. Dengan demikian capaian indikator ini melebihi target yaitu sebesar 105,33%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

Pada Tahun 2021, Indikator kinerja Puslit yang *pertama* adalah Persentase hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, Parliamentary Review, dan Prosiding Seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Tabel 8 menunjukkan produk Puslit yang telah disampaikan kepada anggota DPR baik secara fisik maupun melalui *Website* Puslit. Hal ini menunjukkan bahwa target pencapaian akuntabilitas Tahun 2021 terhadap indikator kinerja utama (IKU) Puslit telah berhasil terealisasi seluruhnya atau sebanyak 100%. Jenis dan jumlah *output* dari indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi Produk Pusat Penelitian Tahun 2021

No.	Kegiatan	Jumlah	Produk
1.	Penelitian AKD	15	Laporan
2.	Penelitian Kelompok	19	Laporan
3.	Jurnal Negara Hukum	2	Jurnal
4.	Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik	2	Jurnal
5.	Jurnal Aspirasi	2	Jurnal
6.	Jurnal Politika	2	Jurnal
7.	Jurnal Kajian	2	Jurnal
8.	Buku	22	Buku
9.	Info Singkat	24	Majalah
10.	<i>Parliamentary Review</i>	4	Jurnal

11.	Seminar	4	Laporan
12	Isu Sepekan	260	Analisis Singkat
	Jumlah	358	

Sumber: Puslit, 2021.

1. Penelitian

Penelitian merupakan salah satu tugas dan fungsi pokok yang dilaksanakan oleh para peneliti Puslit. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Puslit, yaitu mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral dan akuntabel. Penelitian dilakukan sesuai dengan tahapan penelitian yang telah ditentukan oleh Tim Koordinasi Penelitian (TKP), yaitu prapenelitian (penentuan tema, penyusunan proposal), penelitian (pelaksanaan penelitian di 2 lokasi penelitian, penyusunan *interm report* dan laporan kegiatan di lokasi penelitian, penyusunan laporan penelitian dan *executive summary*), serta pascapenelitian (penyerahan laporan penelitian kepada kepala Puslit dan Pimpinan AKD, penyusunan infografis hasil penelitian, publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku/jurnal/karya tulis ilmiah lainnya).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Puslit didasarkan pada tema, topik, atau bidang masalah yang relevan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Anggota DPR RI. Untuk penentuan tema, topik, dan masalah tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu permintaan dari AKD atau pengajuan usul dari masing-masing kelompok penelitian/para peneliti. Penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari 15 penelitian berdasarkan permintaan AKD, 19 penelitian kelompok, dan 1 Penelitian Survei.

Semua kegiatan penelitian memberikan *output* berupa laporan penelitian, *executive summary*, dan infografis. Laporan penelitian sesuai permintaan AKD disampaikan kepada AKD yang bersangkutan. Di samping itu, hasil penelitian menjadi dasar bagi para peneliti dalam penulisan buku dan jurnal. *Executive summary* hasil penelitian tahun 2021 dicetak dalam

bentuk buku laporan. Sedangkan infografis diunggah pada *website* Puslit sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas.

Kegiatan penelitian masih dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan berakhirnya tahun 2021. Adapun pengaruh yang cukup besar terjadi pada bulan Mei 2021, dimana gelombang kedua penyebaran Covid-19 terjadi di Indonesia, hal ini memengaruhi pelaksanaan penelitian di tahun 2021, yaitu:

- a. Pelaksanaan penelitian berdasarkan permintaan AKD dan/atau penelitian kelompok ke lokasi penelitian baru dapat dilakukan lagi setelah Juli 2021.
- b. Penggantian daerah/lokasi penelitian menjadi *trending* dikarenakan peneliti berusaha untuk tidak menggunakan transportasi umum yang telampau jauh atau lama, sehingga daerah penelitian menjadi cenderung homogen, yaitu sekitar Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
- c. Banyak *stakeholders* di daerah yang tidak berkenan menerima peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara *offline*.
- d. Pengalihan sebagian besar anggaran penelitian untuk penanggulangan Covid-19.
- e. Penyerahan hasil penelitian kepada AKD menjadi tertunda sehingga *outcome* dari kegiatan penelitian terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang DPR RI belum terwujud secara optimal.
- f. Sosialisasi hasil penelitian belum sepenuhnya dapat dilakukan secara maksimal oleh setiap kelompok penelitian.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh TKP untuk meningkatkan kualitas penelitian, sebagai berikut (a) perlu segera diputuskan mengenai kebijakan penelitian berdasarkan hasil dari perubahan struktur jabatan fungsional baru. (b) tata cara dan prosedur penelitian perlu diperbaiki agar lebih ringkas dan tidak memakan waktu yang panjang. (c) penelitian berdasarkan permintaan AKD perlu ditinjau kembali mengenai pelaksanaan

dan hasil penelitiannya. (c) anggaran penelitian berdasarkan permintaan AKD perlu disamakan dengan anggaran penelitian kelompok. (d) Laporan penelitian harus diserahkan kepada AKD yang mengusulkan tema/topik. (e) Dalam penentuan topik penelitian berdasarkan permintaan AKD perlu mekanisme yang dapat melibatkan seluruh kepakaran peneliti dengan memperhatikan waktu yang dibutuhkan TKP untuk membahas dan mengakomodir seluruh kepakaran peneliti termasuk keanggotaan tim.

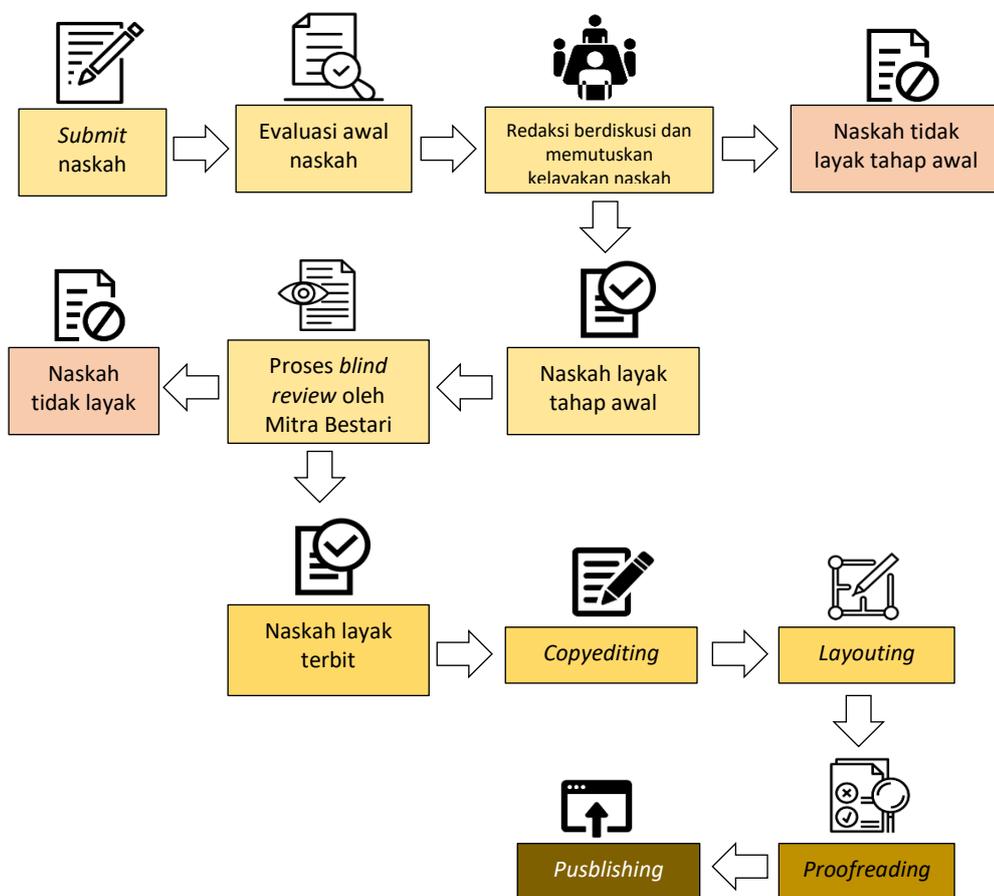


Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

2. Jurnal Ilmiah

Puslit memiliki produk atau karya tulis ilmiah berupa jurnal, yaitu Jurnal Negara Hukum (JNH), Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (JEKP), Jurnal Aspirasi, Jurnal Politica, dan Jurnal Kajian. Kelimanya memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda sesuai dengan bidang dan isu yang menjadi sasaran dan perhatian. Selain itu, frekuensi penerbitan masing-masing jurnal dalam setahun juga berbeda-beda dan pada bulan yang beragam.

Secara umum alur pengelolaan naskah (*paper*) hingga penerbitan jurnal memiliki pola yang sama ketika proses pengelolaannya dilakukan melalui *open journal system* (OJS). Detailnya disajikan pada Gambar 7. Di sisi lain, beberapa redaksi jurnal masih mengaplikasikan metode “setengah” OJS atau mengkombinasikan antara OJS dengan *submit* manual karena mensiasati keterbatasan, baik jumlah SDM maupun informasi penggunaan OJS oleh penulis dan Mitra Bestari (MB).



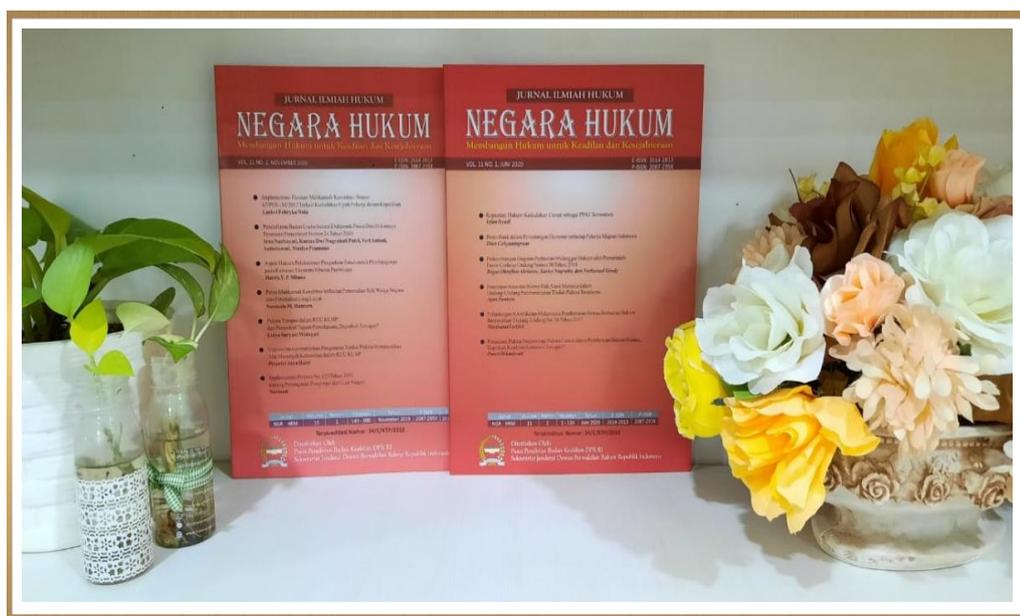
Gambar 7. Alur Pengelolaan Naskah pada Jurnal JNH

a. Jurnal Negara Hukum

Penerbitan Jurnal Negara Hukum (JNH) merupakan salah satu bentuk kontribusi dukungan keahlian yang diberikan oleh peneliti bidang hukum

kepada DPR RI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya. JNH pada tahun 2021 ini telah memasuki tahun penerbitan ke 12 dan telah terakreditasi **Sinta 2** sejak tahun 2018. Saat ini sedang menunggu hasil penilaian reakreditasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

JNH berisi hasil penelitian dan kajian dari para peneliti dari berbagai kepakaran di bidang ilmu hukum. Kepakaran yang dimaksud adalah hukum tata negara/hukum konstitusi, hukum ekonomi/perdata, hukum pidana, dan hukum internasional. JNH juga terbuka bagi bagi penulis dari luar instansi Setjen DPR RI, baik berasal dari akademisi/dosen maupun peneliti pada K/L lainnya.



Gambar 8. Jurnal Negara Hukum

Penerbitan JNH dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Juni dan November. Pada tahun 2021 ini jumlah artikel yang masuk meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 35 artikel untuk terbitan bulan Juni 2021 dan 31 artikel untuk terbitan November 2021. Setelah melalui proses *review* oleh Mitra Bestari (MB) dan Redaksi, untuk terbitan Juni 2021

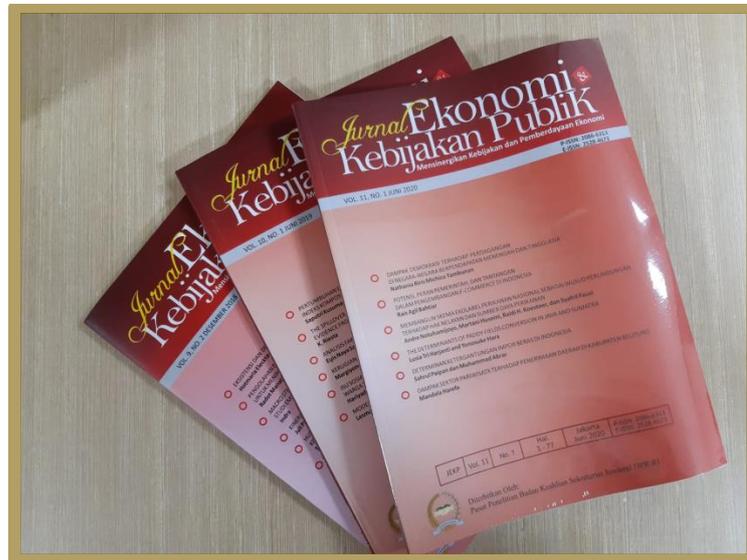
terdapat 8 artikel yang layak dimuat, terdiri atas 4 artikel dari penulis dalam dan 4 artikel dari penulis luar. Demikian pula, untuk edisi November 2021 ada 8 artikel yang layak dimuat, dengan komposisi 4 artikel dari penulis dalam dan 4 artikel dari penulis luar (daftar artikel dan penulis terlampir).

Beberapa kendala dan tantangan yang masih dihadapi oleh Redaksi JNH dalam pengelolaannya, yaitu (1) keterlibatan MB sebagai *reviewer* yang bukan merupakan anggota dewan redaksi merupakan hal yang penting. Pemilihan MB yang sesuai dengan substansi artikel menjadi kendala ketika MB yang ditentukan terlalu sibuk, sehingga terlambat menyampaikan hasil *review*-nya. Di samping itu, kadang kala MB memberikan masukan yang sangat minim, sehingga Redaksi yang sesuai dengan bidang kepakarannya perlu melengkapi hasil *review* MB tersebut, (2) untuk abstrak dan artikel yang ditulis dalam Bahasa Inggris dibutuhkan koreksi dari ahli yang selain mempunyai kemampuan dalam Bahasa Inggris juga memahami istilah baku dalam ilmu hukum. Sementara itu, tidak tersedia anggaran untuk honor ahli tersebut di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan (3) pada saat ini, dewan editor/redaksi, *administrator of journal website*, dan staf administrasi dirangkap oleh peneliti bidang hukum. Hal ini mengakibatkan berkurangnya waktu peneliti hukum untuk mengerjakan tugas pokoknya. Untuk itu disarankan agar di dalam dewan editor/redaksi terdapat unsur dari luar, serta *administrator of journal website* dan staf administrasi tidak lagi dirangkap oleh peneliti hukum. Hal ini membutuhkan dukungan SDM dan anggaran.

b. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (JEKP) menaruh perhatian terhadap isu ekonomi dan kebijakan publik. Pengelolaan JEKP dilaksanakan oleh para peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik. Pada tahun 2021, JEKP telah menerbitkan 2 nomor, yaitu Vol. 12 No. 1, Juni 2021 dan Vol. 12, No. 2, Desember 2021 dengan total sebanyak 12 tulisan. Pada 3 Agustus 2020,

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik telah mendapatkan hasil penilaian akreditasi jurnal ilmiah (Sinta 2) dari Kemendikbudristek.



Gambar 9. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

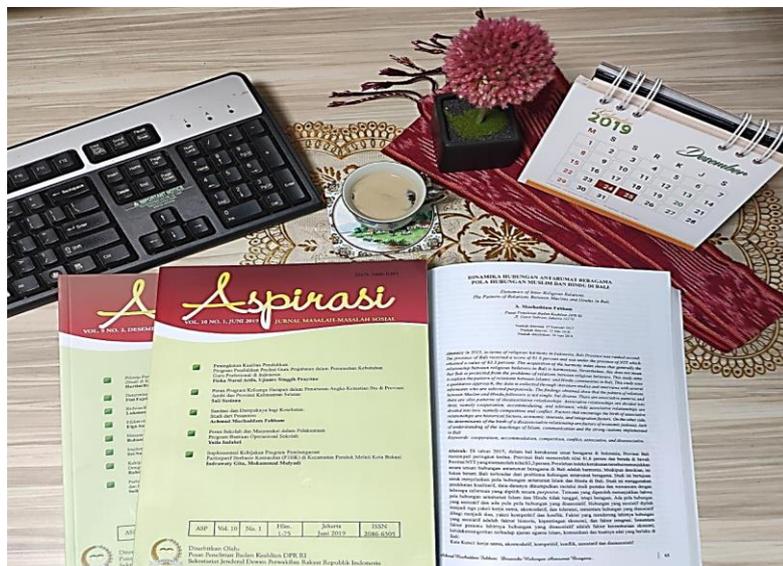
Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh redaksi dalam penerbitan di tahun 2021 ini, antara lain 1) Masih ada calon penulis dan MB sebagai pengguna *e-Journal* OJS belum terbiasa dengan aplikasi OJS; 2) Apabila terjadi gangguan jaringan pada *server* instansi terkait, pengguna harus mengulang kembali prosesnya; 3) Ketersediaan dana untuk honor narasumber yang menggunakan sistem *reimbursement*, sangat menyulitkan bagi redaksi karena harus menyediakan terlebih dahulu dananya; 4) Masih minimnya manuskrip masuk dari penulis internal, khususnya dari para peneliti bidang EKP; 5) Belum adanya aplikasi untuk membuat *layout* mandiri sehingga proses penerbitan bisa lebih cepat. Selama ini proses revisi *dummy* masih menjadi kendala dalam usaha ketepatan waktu untuk di-*publish* secara OJS; 6) Permasalahan teknis pada email Jurnal yang berdampak pada terlambatnya lalu lintas keluar masuk email dan hal tersebut telah diinformasikan ke Kapuslit untuk penanganannya; 7) Kualitas tulisan berbahasa Inggris harus ditingkatkan

sehingga diperlukan anggaran untuk penerjemah (translator) manuskrip jurnal dari internal Puslit untuk membiasakan para penulis menyiapkan manuskrip berbahasa Inggris. Sejauh ini, Puslit telah menggunakan fasilitas koreksi *grammarly* yang dilanggan oleh Bidang Perpustakaan DPR RI untuk mengoreksi abstrak dan manuskrip berbahasa Inggris; 8) Jumlah MB untuk jurnal terindeks Sinta 2, saat ini masih dianggap belum ideal untuk *review* manuskrip yang masuk sehingga perlu menambah jumlah MB dan menambah anggaran untuk honor MB. Idealnya 1 (satu) manuskrip *di-review* oleh 2 (dua) orang MB, dan bahkan membutuhkan 3 (tiga) MB dalam hal putusan hasil *review* kedua MB sebelumnya saling bertentangan. Untuk itu, pengelola jurnal akan mencoba menugaskan MB internal yang sesuai dengan kualifikasi/jenjang akademik yang dipersyaratkan; 9) Permasalahan teknis terkait *Digital Object Identifier* (DOI). Seringkali terjadi *error* pada DOI karena berbagai faktor, termasuk judul manuskrip yang menggunakan dwi bahasa. Untuk itu, diperlukan *effort* untuk mengecek dan mengatasi *error* tersebut melalui *report* email dan akun *crossref*; 10) Perlunya arahan pimpinan atas tata cara pembayaran honor MB dari luar negeri sebagai landasan penyusunan SOP sehingga redaksi jurnal dapat segera mendayagunakan MB luar negeri yang telah menyatakan kesediaannya dalam tahun 2021 ini; 11) Perlu dorongan manajemen untuk mengimplementasikan *skill* dan pengetahuan yang telah didapatkan dari pelatihan migrasi OJS-3 untuk pengelolaan OJS secara kontinyu dan merealisasikan proses migrasi tersebut sehingga pengelolaan berbasis OJS akan lebih aman; 12) Keterlambatan *upload* dalam sistem OJS sering terjadi akibat terlambatnya pembuatan *layout* jurnal sehingga dibutuhkan penguasaan teknis tersebut oleh tim redaksi. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan lanjutan dan penyediaan *software*, salah satunya *Indesign*; dan 13) Perlunya rotasi/penyegaran kepemimpinan dewan redaksi jurnal untuk memastikan proses pembelajaran dan tata kelola jurnal yang semakin baik.

c. Jurnal Aspirasi

Jurnal Aspirasi telah menjadi kanal publikasi para peneliti dengan lingkup kajian tentang kesejahteraan sosial dan isu-isu yang menjadi perhatian Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X. Artikel yang diterbitkan Jurnal Aspirasi meliputi bidang sosiologi, psikologi, pendidikan, lingkungan, agama, dan ketenagakerjaan, kesehatan.

Sejak tahun 2017, Jurnal Aspirasi telah menggunakan OJS dalam rangka meningkatkan kualitas, akses publikasi, dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan akreditasi jurnal dari Kemendikbudristek. Jurnal Aspirasi dapat diakses di laman <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index> dan saat ini telah terakreditasi Sinta 2. Pada tahun 2021, Jurnal Aspirasi telah mempublikasikan 2 nomor, yaitu edisi Juni 2021 (6 artikel) dan Desember 2021 (8 artikel).



Gambar 10. Jurnal Aspirasi

Jurnal Aspirasi telah melakukan beberapa perbaikan dalam melengkapi OJS dan juga dokumen yang perlu disiapkan penulis, antara lain perbaikan *policies, focus & scope, editorial board, peer-reviewer,*

author guidelines, authorship agreement, copyright transfer agreement, template, dan setting OJS. Semenjak Jurnal Aspirasi terindeks Sinta 2, maka jumlah artikel yang diterima untuk setiap terbitan meningkat tajam, sementara ada batasan jumlah artikel yang dapat diterbitkan, oleh karena itu, perlu seleksi awal yang ketat, terhadap terhadap artikel yang layak diterbitkan. Dengan demikian Jurnal Aspirasi masih membutuhkan panduan yang jelas dan tegas mengenai: pengulasan artikel oleh redaksi dan oleh mitra bestari serta penentuan kriteria artikel yang dapat diproses lebih lanjut, perlu perbaikan mayor di awal oleh penulis, atau bahwa kriteria artikel yang dinilai belum layak diproses lebih lanjut. Seiring dengan banyaknya artikel yang diterima redaksi, tantangan lainnya adalah dibutuhkan makin banyak mitra bestari dari berbagai kepakaran dan bidang ilmu untuk mereview artikel tersebut.

d. Jurnal Politica

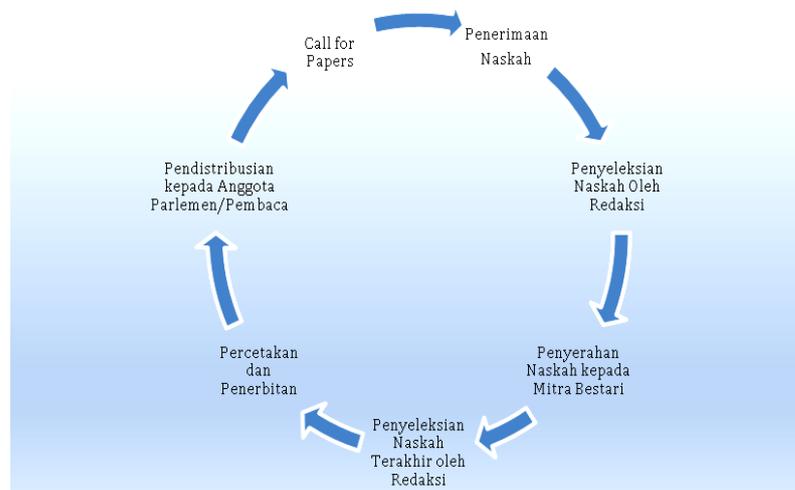
Penerbitan Jurnal *Politica* terbit 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan November. Penerbitan Jurnal *Politica* merupakan bentuk dukungan keahlian dari peneliti bidang Hubungan Internasional (HI) dan Politik Dalam Negeri (PDN) kepada DPR RI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya. Di dalam setiap penerbitannya, Jurnal *Politica* mengetengahkan karya tulis ilmiah baik hasil penelitian maupun kajian oleh para peneliti dari berbagai kepakaran di bidang hubungan internasional dan politik dalam negeri. Sebagai sebuah terbitan ilmiah, jurnal *Politica* memberi kesempatan kepada para penulis dari luar Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI untuk berpartisipasi dalam penulisan.



Gambar 11. Jurnal Politica

Sejak Tahun 2019 Redaksi Jurnal *Politica* telah melaksanakan proses penerbitan jurnal melalui mekanisme *Open Journal System* (OJS), demikian juga di Tahun 2021 ini. Jurnal *Politica* dapat diakses pada laman <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/Politica>. Informasi terkait Jurnal *Politica* seperti *call of papers*, pengelolaan naskah, dan artikel yang sudah diterbitkan dapat diakses di laman tersebut. Dengan sistem OJS maka penulis dapat mengirimkan naskahnya secara *online submissions* untuk registrasi dengan mengakses pada laman portal Jurnal Politica dengan alamat di <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/Politica/about/submissions>. Kendati demikian, Redaksi juga masih menerima naskah melalui email jurnal.politica@yahoo.com.

Pada tahun 2021, Jurnal Politica dua kali melakukan penerbitan yaitu pada bulan Mei dan bulan November 2021. Setiap penerbitan, jurnal Politica berusaha secara konsisten menerbitkan antara 5 sampai 6 tulisan setelah melalui proses seleksi yang ketat mengingat setiap terbitan lebih dari 20 tulisan yang masuk ke redaksi. Gambar dibawah memperlihatkan alur penerbitan Jurnal Politica.



Gambar 12. Alur Penerbitan Jurnal Politica

Setelah dua tahun terbit dengan tata kelola yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perlu dilaporkan bahwa jurnal Politica saat ini sedang dalam proses mendapatkan akreditasi jurnal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kerja redaksi politica dalam dua tahun terakhir ini.



Gambar 13. Proses akreditasi Politica

Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh redaksi Jurnal *Politica* setiap kali melakukan penerbitan. Kendala terbesar adalah jumlah redaksi lokal yang hanya 4 orang tetapi harus memeriksa lebih dari 20 artikel. Kesulitan semakin terlihat bila mengkaitkannya dengan status anggota redaksi yang juga peneliti sehingga harus terlibat dalam kegiatan lainnya di Pusat Penelitian. Kesulitan lainnya adalah ketika harus menentukan siapa yang akan menjadi mitra bestari (MB) mengingat masih banyak MB yang belum mempunyai Google ID. Kesulitan juga ditemui ketika banyak tulisan yang masuk dalam Bahasa Inggris yang seharusnya di *review* pula oleh orang yang memahami Bahasa Inggris dengan baik. Namun anggaran yang ada di DIPA hanya untuk *translater* bukan *reviewer*.

Hingga penerbitan bulan November 2021, Dewan Editor/Redaksi; Administrator *Website Journal*; dan Staf Administrasi dirangkap oleh peneliti bidang hubungan internasional dan politik dalam negeri. Padahal para peneliti di kedua bidang itu masih harus terlibat dalam kegiatan lainnya yang sesuai dengan tugas pokoknya seperti kegiatan penelitian dan penerbitan lainnya. Seiring dengan terjadinya perubahan kelembagaan di Puslit pada tahun 2022, diharapkan tata kelola jurnal *Politica* akan semakin membaik dengan melibatkan pihak luar untuk menjadi Dewan Editor/Redaksi. Demikian pula dengan tugas Administrator *Website Journal* dan Staf Administrasi tidak lagi dirangkap oleh peneliti.

e. Jurnal Kajian

Jurnal Kajian merupakan media penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kepada Anggota DPR RI khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sehingga dapat memberi manfaat bagi proses pembuatan keputusan politik yang lebih berkualitas. Kegiatan pengelolaan Jurnal Kajian dilaksanakan oleh para peneliti dari berbagai bidang, yaitu bidang hubungan internasional, politik dalam negeri, kesejahteraan sosial, hukum, dan ekonomi dan

kebijakan publik. Jurnal Kajian terbit 4 kali dalam setahun. Namun pada tahun 2021, Jurnal Kajian hanya menerbitkan 2 nomor saja dalam 1 volume, yaitu Vol. 26 No. 1 yang berisikan 6 tulisan dan Vol. 22 No. 2 yang berisikan 5 tulisan.



Gambar 14. Jurnal Kajian

Beberapa kendala dalam pengelolaan Jurnal Kajian di tahun 2021, yaitu (1) jumlah artikel yang masuk selama tahun 2021 sangat sedikit sekali dan cenderung artikel masuk di akhir tahun sehingga semua proses penerbitan dilakukan menjelang akhir tahun, (2) terdapat 3 (tiga) tulisan yang tidak dilanjutkan perbaikannya oleh penulis selama tahun 2021, (3) terdapat 4 tulisan yang masih perlu diteruskan di tahun 2022 karena proses review dan penerbitannya yang masih belum selesai, dan (4) proses pengalihan sumber daya manusia ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bagi pegawai di Pusat Penelitian yang ingin melanjutkan karir

sebagai jabatan fungsional peneliti dan proses pembentukan jabatan fungsional baru menggantikan jabatan fungsional peneliti pada Pusat Penelitian, cukup menyita waktu dan perhatian peneliti pada Pusat Penelitian sehingga mengurangi minat peneliti di Pusat Penelitian untuk mengirimkan tulisannya ke jurnal Kajian.

Ke depan, redaksi akan segera meneruskan proses penerbitan terhadap 4 artikel yang belum selesai di tahun 2021, mendorong peneliti pada Pusat Penelitian untuk dapat mengirimkan tulisannya di awal tahun agar proses penerbitannya bisa dilakukan sesuai jadwal, memperbaiki format penulisan dan mengurangi jumlah minimal halaman pada jurnal Kajian agar lebih mudah dan menarik minat penulis. Selain itu juga promosi *call for paper* yang lebih intensif akan terus dilakukan untuk menjangkau artikel yang masuk, khususnya dari eksternal Pusat Penelitian.

3. Buku

Kegiatan penerbitan buku merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan para peneliti di Pusat Penelitian. Kegiatan penerbitan buku menjadi hal yang sangat penting dalam menyebarkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para anggota DPR RI dan kepada masyarakat luas. Penerbitan buku memiliki tujuan antara lain yaitu: (1) memberikan masukan atau dukungan bagi DPR RI dalam pelaksanaan tugas baik dalam bidang Legislasi, anggaran dan pengawasan; (2) menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya dalam diseminasi ilmu pengetahuan; (3) meningkatkan kompetensi para peneliti dalam menulis buku; dan (4) menunjang kepakaran atau karier para peneliti di lingkungan Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Produk penerbitan buku Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Setjen DPR RI pada tahun 2021 terdiri dari Buku Individu, Buku Tim dan Buku Gabungan. Buku Individu adalah buku yang ditulis oleh peneliti secara

perorangan. Buku Tim adalah buku yang ditulis oleh beberapa peneliti yang masih berada dalam satu bidang dalam bentuk buku bunga rampai. Buku Gabungan adalah buku yang ditulis oleh penulis secara bersama-sama oleh beberapa peneliti yang masih berada dalam satu bidang. Proses penerbitan tersebut dimulai dari karya yang dihasilkan oleh para peneliti yang merupakan diseminasi hasil penelitian atau pengembangan ilmu dan pengetahuan terkait tugas dan fungsi DPR RI.

Pada tahun anggaran 2021, Pusat Penelitian berhasil menerbitkan dan mencetak buku sebanyak 22 buku yang terdiri dari 5 buku individu dan 17 buku tim. Penerbitan buku yang berjumlah 22 tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan 3 penerbit yaitu Penerbit Intrans, Penerbit Publica dan Penerbit Obor.

Penerbitan buku-buku tahun anggaran 2021 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan indikator utama yaitu diterbitkannya buku tahun anggaran sesuai tepat waktu sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan oleh Tim Buku Pusat Penelitian pada awal tahun 2021. Namun dalam proses penerbitan buku-buku tersebut ada beberapa evaluasi yang dirasakan perlu diperbaiki untuk penerbitan buku-buku Pusat Penelitian pada tahun mendatang. Evaluasi dan masukan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan *time schedule* yang tepat disertai dengan pengawasan dan pendampingan tim buku bidang terhadap para peneliti merupakan cara efektif untuk mengawal dan menjaga agar buku-buku terbitan Pusat Penelitian terbit sesuai dengan waktu yang telah. Hal ini terbukti berhasil di tahun anggaran 2021 yang menerbitkan buku-buku tepat waktu
2. Masih terdapat beberapa penulis terutama Peneliti Muda yang belum memahami cara menyusun buku dengan standar Karya Tulis Ilmiah

(KTI) sehingga diperlukannya pelatihan penulisan karya tulis ilmiah khususnya bagi para Peneliti Muda dan secara umum kepada semua Peneliti untuk mererefresh dan menambah soft skill peneliti.

3. Penambahan Kerja sama dengan Penerbit yang ditambah telah berdampak positif terhadap kinerja dan waktu percetakan buku-buku Pusat Penelitian yang cepat dan tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
4. Kepala Pusat Penelitian sudah waktunya untuk mempertimbangkan penerbitan buku-buku secara e-book dan cetak secara bersamaan untuk mempermudah diseminasi dan distribusi buku-buku terbitan Pusat Penelitian khususnya kepada para Anggota DPR RI dan umumnya kepada masyarakat luas.
5. Pemilihan penerbit yang berkualitas terutama penerbit buku ilmiah yang telah memenuhi standar akreditasi buku akan menjadi hal yang perlu demi mempertahankan kualitas buku-buku terbitan Pusat Penelitian.

Program kerja dan realisasi Tim Penerbitan Buku Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Setjen DPR pada tahun anggaran 2021 dapat dinilai berjalan baik dan lancar. Kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Tim Penerbitan Buku secara umum dapat diatasi dan diselesaikan serta tidak sampai menghambat proses penerbitan buku-buku di Pusat Penelitian tahun anggaran 2021. Hal ini dapat dicapai berkat kerja sama dan respons yang baik dari rekan-rekan antara tim buku untuk mengkoordinasikan penerbitan buku-buku terbitan Pusat Penelitian.

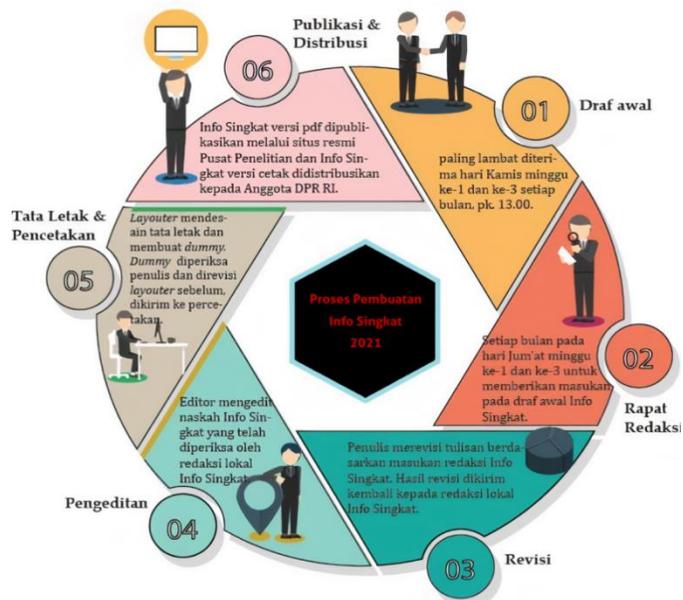
Tim Buku Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Setjen DPR RI ke depan akan semakin penuh tantangan seiring dengan perubahan lingkungan khususnya perubahan yang terjadi di Pusat Penelitian dan

perubahan lingkungan di DPR RI. Untuk itu menghadapi perubahan yang terjadi semakin dinamis di masa yang akan datang maka dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang semakin baik antara Tim Buku Pusat Penelitian dengan Pusat Penelitian khususnya dalam menghadapi perubahan internal yang akan terjadi.

Perubahan yang dilakukan oleh Setjen DPR RI khususnya dalam menuju parlemen modern harus dapat dijawab oleh Tim Buku khususnya dalam agenda ke depan. Proses penerbitan buku cetak harus dapat dibarengi dengan percetakan e-book yang lebih praktis dan mudah dibaca dan dibawa oleh Anggota DPR RI secara khususnya dan masyarakat secara umum. Hal ini dirasa penting agar kehadiran buku-buku terbitan Pusat Penelitian dapat lebih mudah diakses dan dibaca oleh Anggota DPR RI. Semoga buku-buku terbitan Pusat Penelitian dapat selalu menjadi referensi atau acuan yang berkualitas bagi Anggota DPR RI dalam pengambilan kebijakan dan masyarakat umum dalam diseminasi pengembangan ilmu dan pengetahuan.

4. Info Singkat

Info Singkat memuat kajian singkat terhadap isu aktual dan/atau strategis yang perlu mendapat perhatian DPR RI dari 5 bidang kajian yang ada di Puslit, yaitu bidang politik Dalam Negeri, Hukum, Ekonomi dan Kebijakan Publik, Kesejahteraan Sosial, dan Hubungan Internasional. Info Singkat ditulis oleh peneliti Puslit untuk memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI terhadap informasi dan bahan masukan dalam pelaksanaan tugasnya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Info Singkat terbit dua pekan sekali dalam satu bulan. Pada tahun 2021 telah terbit 24 edisi Info Singkat dengan Volume XIII, yang tersaji dalam bentuk edisi cetak dan *online* yang ditampilkan di *website* Puslit. Adapun alur kerja penerbitan Info Singkat dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Alur Penerbitan Info Singkat

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan Info Singkat pada tahun 2021 antara lain: (a) masih adanya draf awal tulisan dari penulis yang belum memenuhi Panduan Penulisan Info Singkat; (b) beberapa tulisan hasil revisi belum sepenuhnya mengikuti masukan dari redaksi; (c) situasi pandemi Covid-19 masih menjadi kendala bagi redaksi untuk melakukan pertemuan tatap muka guna memberi masukan dan membahas naskah Info Singkat yang akan diterbitkan; (d) masih adanya penulis yang mengangkat tema dalam Info Singkat ke dalam produk Puslit lainnya, sehingga terdapat duplikasi tema.



Gambar 16. Info Singkat

Menghadapi kendala tersebut, Redaksi telah mengupayakan beberapa solusi, antara lain: (1) Redaksi mengingatkan penulis untuk memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penulisan Info Singkat; (2) Redaksi, terutama melalui Redaksi Bidang, mengingatkan penulis di bidangnya masing-masing agar secara sungguh-sungguh memerhatikan masukan dari redaksi, terutama yang dianggap relevan untuk perbaikan tulisan; (3) mengingat situasi pandemi Covid-19 belum berakhir, redaksi masih memaksimalkan pertemuan virtual atau penggunaan *email* untuk memberi masukan atas draf Info Singkat yang akan diterbitkan.

Selain itu, untuk penerbitan Info Singkat ke depan, Redaksi merekomendasikan beberapa hal berikut: (1) Redaksi Bidang perlu mengecek draf awal dari penulis dan memastikan bahwa draf awal sudah ditulis sesuai dengan Pedoman Penulisan Info Singkat. Draft awal yang belum sesuai dengan Pedoman Penulisan Info Singkat harus dikembalikan kepada penulis; (2) Redaksi Bidang perlu mengecek revisi yang telah

dilakukan oleh penulis dan memastikan bahwa hasil revisi telah sesuai dengan masukan dari Redaksi. Hasil revisi yang belum sesuai dengan masukan Redaksi harus dikembalikan kepada penulis; (3) Apabila kondisi sudah memungkinkan, Rapat Redaksi dilaksanakan secara tatap muka, sehingga pembahasan mengenai masukan yang akan diberikan kepada penulis lebih optimal.

Sejalan dengan proses peralihan Peneliti Puslit menjadi Analis Legislatif pada tahun 2022 dan rencana penataan pembedangan lingkup kajian Analis Legislatif menjadi 3 bidang, yaitu: Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukham); Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekuinbang); serta Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), maka penerbitan Info Singkat pun perlu melakukan penyesuaian, terutama dalam penyajian substansi tulisan sesuai dengan pengelompokan pembedangan yang baru dan formasi penulisnya.

5. *Parliamentary Review*

Parliamentary Review adalah salah satu produk karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Puslit, berisikan analisis mendalam terhadap sebuah topik/isu strategis bagi DPR dilihat dari berbagai aspek (tematik). Tema utama dalam setiap penerbitan *Parliamentary Review* ditentukan oleh seluruh redaksi yang melingkupi 5 bidang di Puslit, yaitu hukum, ekonomi dan kebijakan publik, kesejahteraan sosial, politik dalam negeri, dan hubungan internasional. Pada tahun 2021, *Parliamentary Review* terbit 4 edisi, yaitu Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap edisi terdiri dari 5 tulisan yang mewakili setiap bidang yang ada di Puslit, kecuali untuk edisi Desember hanya terdiri dari 4 tulisan (bidang ekonomi dan kebijakan publik, bidang kesejahteraan sosial, bidang politik dalam negeri, dan bidang hubungan internasional).



Gambar 17. *Parliamentary Review*

Kendala yang dihadapi redaksi *Parliamentary Review* selama tahun 2020, yaitu (1) kesulitan mencari tema khusus (tematik) dilihat dari 5 bidang ilmu dalam setiap edisi; (2) kesulitan mendapatkan penulis dengan kepakaran yang sesuai dengan tema khusus (tematik) yang diangkat dalam setiap edisi; (3) kesulitan mendapatkan mitra bestari yang memiliki kepakaran sesuai dengan substansi tulisan dan sanggup memberikan review dalam waktu singkat; (4) penulis tidak dapat menyelesaikan draf awal tulisan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh redaksi; (5) kesulitan dalam mengedit naskah hasil revisi dikarenakan jumlah halaman yang jauh melebihi persyaratan pada Pedoman Penulisan; dan (6) proses pencairan honor mitra bestari yang sangat lama.

Berdasarkan kendala yang terjadi maka redaksi *Parliamentary Review* memberikan rekomendasi untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: (1) dalam hal kesulitan mencari tema khusus (tematik) yang dilihat dari 5 bidang pada setiap edisi, maka fleksibilitas tema menjadi alternatif dengan tematik yang diperluas; (b) secara prinsip tetap mengutamakan Peneliti Utama tetap sebagai penulis *Parliamentary Review*, namun juga

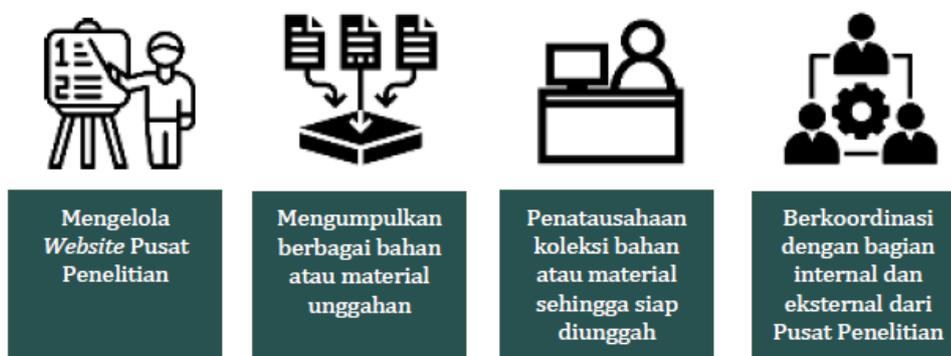
memberi kesempatan bagi mereka yang bukan Peneliti Utama yang siap dengan tema khusus (tematik) yang diangkat; (3) melakukan manajemen sumber daya manusia, sehingga dalam hal kesulitan mendapatkan penulis sesuai dengan bidang yang diangkat, penulis dengan jabatan Peneliti Madya IV/a dapat dipertimbangkan untuk dapat menulis secara individual tanpa perlu tandem; (4) dalam hal kesulitan mendapatkan mitra bestari dari eksternal DPR RI, dapat menggunakan sumber internal yaitu peneliti Pusat Penelitian yang memiliki kapabilitas dan kepakaran sesuai dengan substansi tulisan sebagai Mitra Bestari; (5) mengundang mantan peneliti Puslit yang saat ini menjadi peneliti BRIN untuk menjadi mitra bestari *Parliamentary Review*; (6) redaksi bidang dalam memilih penulis harus mempertimbangkan apakah penulis dapat menyelesaikan naskah tulisan dengan tepat waktu sesuai jadwal; (7) redaksi perlu membuat *Standard of Procedure* (SOP) yang akan disepakati bersama di awal, termasuk di dalamnya Panduan Penulisan; (8) penulis perlu memperhatikan pedoman jumlah halaman di Panduan Penulisan, khususnya pada saat melakukan revisi; (9) dalam hal proses pencairan honor untuk Mitra Bestari yang terlalu lama, maka perlu disusun mekanisme pembayaran yang mempercepat proses yang ada; (10) perencanaan penulisan khusus edisi Desember perlu dipercepat untuk menghindari kendala dikarenakan naskah final harus selesai pada awal Desember, sehingga topik dan penulis ditetapkan lebih cepat; dan (11) jumlah halaman *Parliamentary Review* tetap dipertahankan sehingga *Parliamentary Review* mampu memenuhi kebutuhan dewan dan memudahkan Anggota DPR dalam membaca.

6. Website Pusat Penelitian

Website Puslit merupakan salah satu *website* yang memiliki latar belakang untuk mendukung performa dari DPR RI melalui produk-produk penelitian atau kajian. Dukungan tersebut dapat bersifat langsung dengan produk para peneliti yang membidik kepada fungsi kedewanan maupun secara

tidak langsung melalui pesan, data, dan informasi yang tersebar luas kepada masyarakat. Data dan informasi yang tersaji secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tidak hanya menjadi pemantik bagi terciptanya *business process* yang baik bagi Puslit, namun juga membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

Kehadiran *website* Puslit di dalam institusi parlemen Indonesia, www.puslit.dpr.go.id, memberi warna yang berbeda. Hal tersebut terlihat dari produk-produk para peneliti yang beragam, baik tema atau pokok bahasan maupun jenis produknya. Keberagaman ini tetap dibalut dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat ilmiah, obyektif, dan nonpartisan. Oleh sebab itu, melalui *website* Puslit produk-produk para peneliti tersebut disebarluaskan atau di-diseminasikan kepada seluruh Anggota DPR RI dan masyarakat. Diseminasi membawa dampak positif lain, yaitu bagi pengembangan eksistensi para peneliti dan sekaligus mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.



Gambar 18. Tugas Tim Pengelola *Website* Pusat Penelitian

Selama tahun 2021, Tim Pengelola *website* Puslit telah merealisasikan beberapa program kerja, yaitu (1) Mengelola kesinambungan tampilan *Website* Pusat Penelitian. (2) Melakukan pengumpulan bahan atau material, baik data, berita, kajian, maupun produk lain yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian untuk diunggah secara berkala ke dalam *Website* Pusat Penelitian. (3) Melakukan penatausahaan mulai

dari mengumpulkan, memilih, memilah, memasukkan, sampai memutakhirkan artikel di bidang penelitian, baik yang bersifat ilmiah maupun semi populer, yang akan ditampilkan di Website Pusat Penelitian. (4) Melakukan penatausahaan mulai dari mengumpulkan, memilih, memilah, memasukkan, sampai memutakhirkan data, informasi, dan berita, baik berupa manuskrip maupun foto (gambar), yang akan ditampilkan di Website Pusat Penelitian. (5) Melakukan koordinasi dengan tim lain yang ada di Pusat Penelitian mengenai materi yang akan ditampilkan di Website Pusat Penelitian. (6) Melakukan koordinasi dengan tim lain yang berada di luar Pusat Penelitian untuk perbaikan dan menjaga sistem Website Pusat Penelitian tetap berjalan dengan baik. (7) Melakukan koordinasi dengan tim lain yang berada di luar Pusat Penelitian untuk membangun dan mengembangkan Portal Satu Data DPR RI, baik terkait dengan tampilan portal maupun penginputan metadata-nya.

Evaluasi *website* Puslit dapat dilakukan dari sisi pengelola dan pengunjung/pengguna sehingga akan diperoleh evaluasi yang lebih komprehensif. Evaluasi dari sisi pengelola *website* Puslit adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai pemutakhiran data dan informasi mengalami kendala, khususnya terkait kecepatan atau waktu memutakhirkan, karena adanya masalah koordinasi. Masing-masing personel tim pengelola *Website* Pusat Penelitian memiliki tugas dan fungsi utama yang harus dipenuhi di samping membagi kewajibannya untuk mengelola *Website* Pusat Penelitian.
- b. Mengelola *Website* Pusat Penelitian pada paruh tahun ini sudah tidak masuk dalam pos anggaran Pusat Penelitian. Hal ini menjadikan keberlanjutan dan ruang gerak untuk melakukan *improvement* dari *Website* Pusat Penelitian menghadapi tantangan.

- c. Terdapat fitur di *Website* Pusat Penelitian yang belum terkelola karena belum ada produknya dan/atau SDM yang mendukung. Misalnya Agenda Pusat Penelitian.

Sedangkan evaluasi dari sisi *user* belum dapat dilakukan karena kendala dalam mengakses *Google Analytic*. Beberapa tantangan dan permasalahan yang ada harus diselesaikan oleh tim pengelola *website* Puslit di tahun 2021, antara lain (1) Mendorong disiplin penanggung jawab setiap produk *Website* Pusat Penelitian untuk lebih aktif dalam memutakhirkan data dan informasi. (2) Melanjutkan kembali upaya untuk menyajikan tampilan dan produk *Website* Pusat Penelitian dalam Bahasa Inggris guna memperluas jangkauan akses *user*. (3) Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha (TU) Pusat Penelitian dan pihak penerjemah untuk produk Info Singkat agar proses administrasi berjalan lebih fleksibel sehingga mengantisipasi keterlambatan rilis produk Berbahasa Inggris di *Website* Pusat Penelitian. (4) Mengintensifkan penggunaan *Google Analytics* untuk mengevaluasi *Website* Pusat Penelitian secara berkala (triwulan atau semester) agar lebih responsif terhadap kebutuhan *user*. (5) Diperlukan dukungan anggaran khusus terkait dengan pembuatan infografis produk-produk Pusat Penelitian dan juga anggaran khusus bagi tim pengelola *Website* Pusat Penelitian, (6) Diperlukan tambahan atau revisi terkait dengan tampilan dan kecepatan akses, (7) Belum semua produk Pusat Penelitian divisualisasikan berbentuk infografis, oleh karena itu dibutuhkan tim grafis yang lebih banyak dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Begitu pula dengan platform atau aplikasi diseminasi produk Pusat Penelitian lainnya, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube. (8) *Website* Pusat Penelitian perlu terus dikembangkan agar semakin menarik dan memberikan lebih banyak ragam data dan informasi bagi *user*.

7. Seminar Nasional

Selain melakukan kegiatan penelitian, penerbitan karya tulis ilmiah dalam bentuk Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*, dan kegiatan survei, Puslit juga melakukan kegiatan seminar nasional dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu terkini dari berbagai perspektif sekaligus mengembangkan *networking*.

Namun sejak pandemi Covid-19 di bulan Maret, berbagai *workshop*, diskusi, dan seminar dilakukan secara *hybrid* (daring dan luring). Selama tahun 2021 Puslit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali *web seminar* (*webinar*) nasional, yaitu (a) *Quo Vadis* RUU Pemilu tanggal 4 Maret 2021, (b) Evaluasi PPKM Darurat dalam Perspektif Kesehatan, Sosial, Ekonomi, dan Hukum tanggal 29 Juli 2021, (c) Urgensi Pembangunan Satu Data Indonesia tanggal 14 Oktober 2021, dan (d) Pembangunan Pusat Data Analitik Setjen DPR RI tanggal 28 Oktober 2021.



Gambar 19. Kegiatan Seminar Puslit 2021

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan *webinar* nasional, antara lain (1) ketergantungan pada stabilitas jaringan internet, (2)

menentukan ruang operasional untuk pelaksanaan kegiatan dengan jaringan yang stabil, pencahayaan yang baik, serta suara yang jernih tidak menggema, (3) koordinasi dengan narasumber yang tidak berada dalam ruangan/lokasi yang sama, (4) pertanyaan atau diskusi sulit dilakukan secara interaktif antara peserta dengan narasumber, dan (5) pelaksanaan kegiatan banyak dilakukan menjelang akhir tahun anggaran.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan web seminar nasional apabila akan dilaksanakan kembali di tahun 2021, yaitu (1) tema seminar disesuaikan dengan kebutuhan DPR RI, (2) berkoordinasi secara matang dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan, (3) adanya simulasi acara sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memastikan terpenuhi semua kebutuhan penyelenggaraan, (4) peningkatan diversifikasi promosi acara melalui media sosial, dan (5) tidak menumpuk dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran.

8. Isu Sepekan

Sejak Sejak Oktober 2019, Puslit ditugasi oleh Ketua DPR RI untuk membuat sebuah *info brief* pada setiap akhir pekan yang berisi mengenai analisis singkat terhadap program atau kebijakan Pemerintah yang perlu mendapat perhatian DPR RI. Analisis singkat tersebut berisi program atau kebijakan yang perlu dikritisi, kaitannya dengan pelaksanaan fungsi DPR RI, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan, dan atensi ke depan yang perlu dilakukan oleh DPR RI. Analisis ini dikenal dengan Isu Sepekan, yang terbit mingguan dan terdiri dari lima analisis berasal dari lima bidang, yaitu politik, hukum, ekonomi, sosial, dan hubungan internasional yang disajikan secara rutin tiap minggu.

Isu Sepekan sudah disampaikan secara rutin kepada 5 pimpinan DPR RI. Namun untuk memperluas cakupan Isu Sepekan, mulai tahun 2021, isu Sepekan sudah dapat diakses di media sosial Instagram dan *website* Puslit.

Selama tahun 2021 Isu Sepekan telah terbit 52 minggu x 5 artikel = 260 artikel. Namun walaupun Isu Sepekan telah terbit secara rutin dan dalam jumlah yang sedemikian banyak, namun pada tahun 2021 belum ada penganggaran dari DIPA baik itu untuk penulis maupun redaksi.

Pengerjaan Isu Sepekan oleh peneliti dari 5 bidang (Hukum, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Kebijakan Publik, Hubungan Internasional dan Politik Dalam Negeri) dalam format Microsoft Word. Kemudian dilakukan proses review dan revisi oleh masing-masing Korbid. Pengeditan dan layout oleh layouter dan disiapkan 2 bentuk file pdf yaitu: versi lengkap untuk disampaikan ke pimpinan (terdiri dari isu/permasalahan, fungsi DPR RI, atensi DPR RI dan sumber referensi) serta versi ringkas untuk diunggah ke laman puslit.go.id (terdiri dari isu/permasalahan dan sumber referensi saja). Isu Sepekan versi lengkap dalam bentuk pdf kepada Kapuslit untuk di-share ke pimpinan Sementara itu Isu Sepekan versi ringkas diunggah dalam bentuk pdf di laman puslit.go.id. Selanjutnya dilakukan pembuatan ringkasan Isu Sepekan sebagai bahan yang akan di-layout dan diunggah oleh Tim Website bagian Media Sosial ke akun Instagram: @puslitbkdoofficial.



Gambar 20. Alur Pengerjaan Isu Sepekan

Beberapa kendala dan tantangan masih dihadapi dalam penerbitan isu sepekan ini, antara lain (1) dal ada kalanya masih ada hal-hal substansi yang perlu diperjelas, dilengkapi atau diperbaiki , (2) Kadang masih ditemui ketidaksamaan atau ketidaksesuaian warna desain dengan bidangnya masing-masing, isi yang belum lengkap atau belum sesuai (misal dalam penulisan tanggal, logo Sekjen DPR, dsb.), dan (3) dari segi kedalaman materi, ada ketidaksamaan isi paragraf dan kedalaman materi pada tiap terbitan, kadang ditemui jumlah paragraf yang terlalu minimalis, atau bagian isu/permasalahannya terlalu sedikit. Oleh karena itu, menjadi tantangan dan dibutuhkan keterampilan tersendiri bagi para penulis untuk menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk yang simpel serta informatif namun dapat dipahami dengan baik oleh Anggota DPR RI.



Gambar 21. Isu Sepekan

C. Evaluasi dan Analisis Kepuasan Pengguna Layanan Pusat

Penelitian

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2021 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Puslit yakni anggota DPR menjadi salah satu indikator kinerja Puslit. Indeks kepuasan pengguna layanan yang ditargetkan pada Tahun 2021 adalah 3,22. Survey pengguna layanan Puslit tahun 2021 belum selesai dilakukan dan hasilnya belum bisa diterbitkan. Untuk itu penilaian realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Puslit Tahun 2021 menggunakan hasil Survei Tahun 2020. Berdasarkan hasil survey tersebut, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Puslit adalah 3,27, dengan demikian capaian Indikator Kinerja ini adalah 101,55%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Berdasarkan Permenpan RB tersebut maka Setjen DPR RI menugaskan kepada Puslit untuk melakukan survei kepada Anggota DPR RI sebagai penerima dukungan pelayanan (*user*) dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugasnya di DPR RI.

Pelaksanaan survei ini juga merupakan salah satu target kinerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) dalam Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020. Survei tahun 2020 ini dilaksanakan pada bulan September–Desember 2020 untuk menilai kinerja Setjen DPR RI selama kurun waktu Januari–November 2020. Hasil survei sudah dapat diperoleh sebelum tahun anggaran 2020 berakhir sehingga dapat digunakan dalam pengisian Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Pada tahun 2020 ini dan dikarenakan pandemi COVID-19, survei dilakukan dengan menggunakan media digital yaitu *Google Form* dan isian manual melalui email. Selain itu, ada juga pengisian survei yang dilakukan melalui tatap muka/wawancara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Kuesioner disusun dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan Skala Likert 1 sampai dengan 4 (1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas). Daftar pertanyaan survei (kuesioner) didasarkan pada unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Lampiran I Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan Setjen DPR RI. Unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam kuesioner, yaitu sebagai berikut (1) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, (2) Waktu Penyelesaian, (3) Produk Spesifikasi Jenis Layanan, (4) Kompetensi dan Perilaku SDM, (5) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, (6) Sarana dan Prasarana, dan (7) Keahlian. Sebagai tambahan pertanyaan di tahun ini yaitu terkait pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan Gedung DPR RI. Uji validitas dilakukan dengan teknik *Bivariate Pearson* (Korelasi *Pearson Product Moment*) dengan derajat kepercayaan 95% dan didapat bahwa masing-masing butir pertanyaan pada kuesioner adalah valid.

Pengolahan data juga dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Permenpan RB No. 14 Tahun 2017. Dengan menggunakan *margin error* sebesar 5% dan *confidence level* 95%, didapat hasil sampel minimal adalah 231 responden yang terdiri dari 9 fraksi di DPR RI dengan total populasi 575 orang. Responden yang diambil pada survei kinerja Setjen DPR RI adalah Anggota DPR RI periode tahun 2019-2024 sebagai pengguna (*user*) layanan Setjen DPR RI.

Tabel 9. Hasil Survei Berdasarkan Fraksi

No.	Fraksi	Jumlah Anggota	Sampel	NI	NIK
1.	Fraksi PDIP	128	51	3,542	88,545
2.	Fraksi Partai Golkar	85	34	3,219	80,486
3.	Fraksi Partai Gerindra	78	31	3,064	76,592
4.	Fraksi Partai Nasdem	59	24	3,350	83,745
5.	Fraksi PKB	58	23	3,419	85,469
6.	Fraksi Partai Demokrat	54	22	3,074	76,854
7.	Fraksi PKS	50	20	3,018	75,450
8.	Fraksi PAN	44	18	3,180	79,496
9.	Partai PPP	19	8	3,260	81,496
	Jumlah	575	231	3,270	81,760

Sumber: Puslit, 2020. Diolah

Keterangan: NI: Nilai Interval

NIK: Nilai Interval Konversi

Survei menghasilkan tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Setjen dengan Nilai Interval 3,27 atau Nilai Interval Konversi (NIK) 81,76 termasuk dalam kategori “Baik”. Apabila dibandingkan dengan hasil survei atas kinerja 2019 yang NIK-nya mencapai 80,25, maka hasil survei tahun 2020 dengan NIK 81,76 terdapat kenaikan sebesar 1,51.

Karakteristik responden yang dihasilkan dalam survei ini yaitu 80% responden berjenis kelamin laki-laki dan 20% responden berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari lamanya keanggotaan responden sebagai Anggota DPR RI, 40,69% responden baru menjadi Anggota DPR RI, 35,93% responden telah menjadi Anggota DPR RI selama 2 periode, dan 23,38% responden telah menjadi Anggota DPR RI lebih dari 2 periode. Menariknya di sini, Anggota DPR RI yang telah lebih dari 2 periode memberikan nilai kepuasan paling tinggi terhadap layanan Setjen DPR RI (Tabel 10).

Tabel 10. Hasil Survei Berdasarkan Periode Responden Menjadi Anggota DPR RI

Lama Periode	Jumlah	NI	NIK
1 (satu) periode	94	3,366	84,138
2 (dua) periode	83	3,326	83,147
Lebih dari 2 (dua) periode	54	3,440	85,994
Seluruh Responden	231	3,270	81,760

Sumber: Puslit, 2020. Diolah

*Keterangan: NI: Nilai Interval
NIK: Nilai Interval Konversi

Survei juga menghasilkan tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah diberikan Puslit selama tahun 2020 yaitu dengan Nilai Interval 3,21 atau Nilai Interval Konversi 80,249 masuk dalam kategori “Baik”. Salah satu kendala yang dialami dalam pelaksanaan survei di tahun 2020 ini antara lain, yaitu pengisian survei umumnya dilakukan melalui *Google Form* dan pengiriman *email* sehingga apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami oleh responden tidak dapat dijelaskan langsung oleh Setjen DPR RI. Beberapa saran yang dapat disampaikan terkait pelaksanaan survei kepuasan pengguna terhadap dukungan Setjen DPR RI ini, yaitu (1) secara berkelanjutan, Setjen DPR RI diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme kerjanya, karena hal tersebut merupakan salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan prima sehingga dapat meminimalisir berbagai keluhan yang ada. Setjen DPR RI diharapkan memiliki kecakapan, keterampilan, serta mampu menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya sehingga penyelenggaraan dukungan yang berkualitas kepada DPR RI dapat terwujud, (2) survei ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan Setjen DPR RI dalam menyusun pertanggungjawaban dan perencanaan sehingga ada sinkronisasi kebutuhan antara perencanaan, pertanggungjawaban, dan peningkatan kualitas dukungan yang diselenggarakan, (3) perlu disampaikan kepada Anggota DPR RI, semacam panduan yang menjelaskan jenis layanan dan tata cara penggunaan layanan tersebut,

baik layanan administrasi, persidangan maupun keahlian. Bagi Kesetjenan yang menyediakan layanan, agar ditetapkan SOP penyelenggaraannya, dan (4) khusus dukungan keahlian, perlu mengedepankan sinergi antar pusat di Badan Keahlian DPR RI dan harmoni dengan Tenaga Ahli dan Sekretariat di masing-masing AKD.

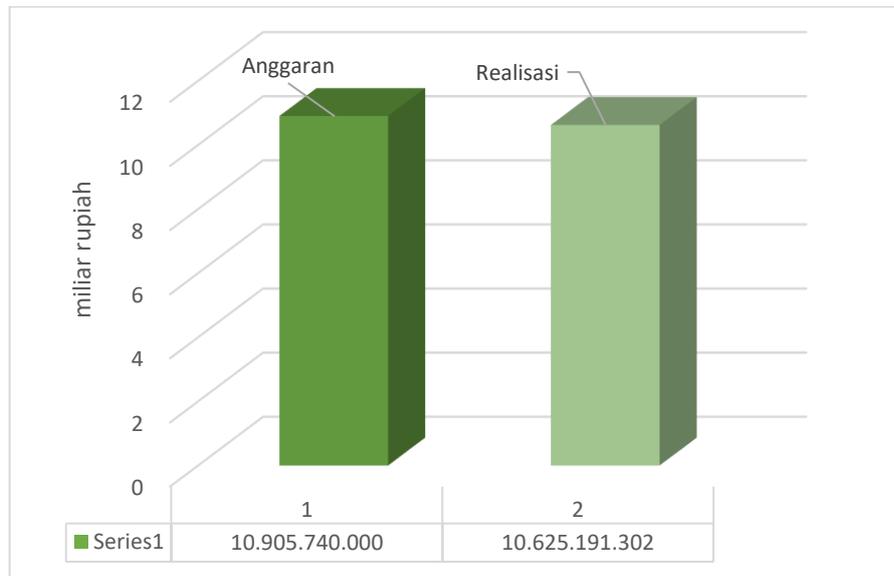
D. Kinerja Anggaran

Jumlah anggaran tahun 2021 setelah mengalami *refocusing* dan revisi adalah sebesar Rp10.905.740.000,- (Sepuluh miliar Sembilan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 97,43% atau senilai Rp10.625.191.302,- (Sepuluh miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah). Anggaran ini digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan (Tabel 11 dan Gambar 22).

Tabel 11. Anggaran Pusat Penelitian Tahun 2021

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
10.905.740.000	10.625.191.302	97,43

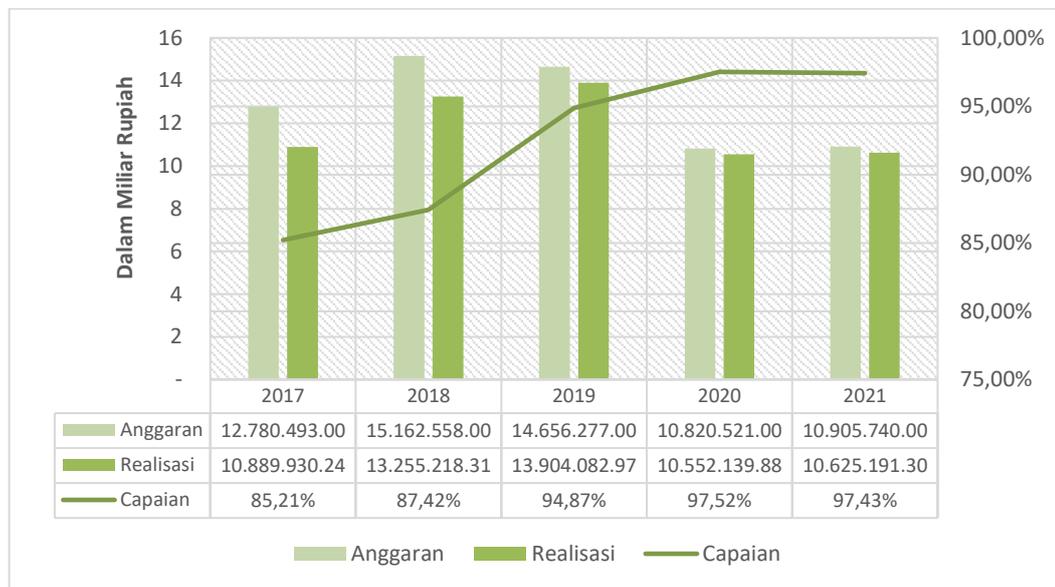
Sumber: Puslit, 2021.



Sumber: Puslit, 2021.

Gambar 22. Target dan Realisasai Anggaran Puslit Tahun 2021

Gambar 20 memperlihatkan perbandingan anggaran Puslit selama lima tahun terakhir (tahun 2017 hingga 2021). Pada tahun 2020 anggaran Puslit mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sekitar 26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan bahkan menurun sebesar 28% apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Tahun 2021 anggaran Puslit hanya meningkat sebesar 0,79%. Sedangkan bila dilihat dari segi realisasinya, realisasi anggaran Puslit selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2021, realisasi anggaran mengalami sedikit penurunan sebesar 0,09%. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 anggaran Puslit mengalami penuruna yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun kegiatan Puslit tetap bisa berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Bahkan beberapa tugas tambahan dari Dewan yang tidak dianggarkan seperti Isu Sepekan terlaksana dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan tugas pendampingan dan bantuan keahlian lainnya seperti pidato, kata sambutan, makalah dan lain sebagainya.



Sumber: Puslit, 2021.

Gambar 23. Perbandingan Anggaran, Realisasi dan Capaian Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Secara garis besar, anggaran Puslit dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar yaitu: Anggaran kegiatan dalam rangka Kajian Kedewanan; Anggaran kegiatan dalam rangka Kebijakan Pusat Penelitian; dan Anggaran Operasional Penelitian.

Anggaran dan realisasi kegiatan Puslit dalam rangka memenuhi target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Anggaran Kegiatan Puslit Tahun 2021

Kegiatan		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Kajian Kedewanan		8.625.812.000	8.377.710.941	97,12
A	Kegiatan Pendukung dan Penerbitan Karya Tulis Ilmiah	2.264.199.000	2.083.466.625	92,02
B	Pengelolaan <i>Website</i>	21.000.000	21.000.000	100
C	Kegiatan Internal Pusat Penelitian	310.417.000	309.700.000	99,77
D	Kegiatan Kepakaran Peneliti	379.467.000	372.686.216	98,21
E.	Kegiatan Diskusi dalam Rangka Penerbitan Karya Tulis Ilmiah	330.240.000	322.240.000	97,58

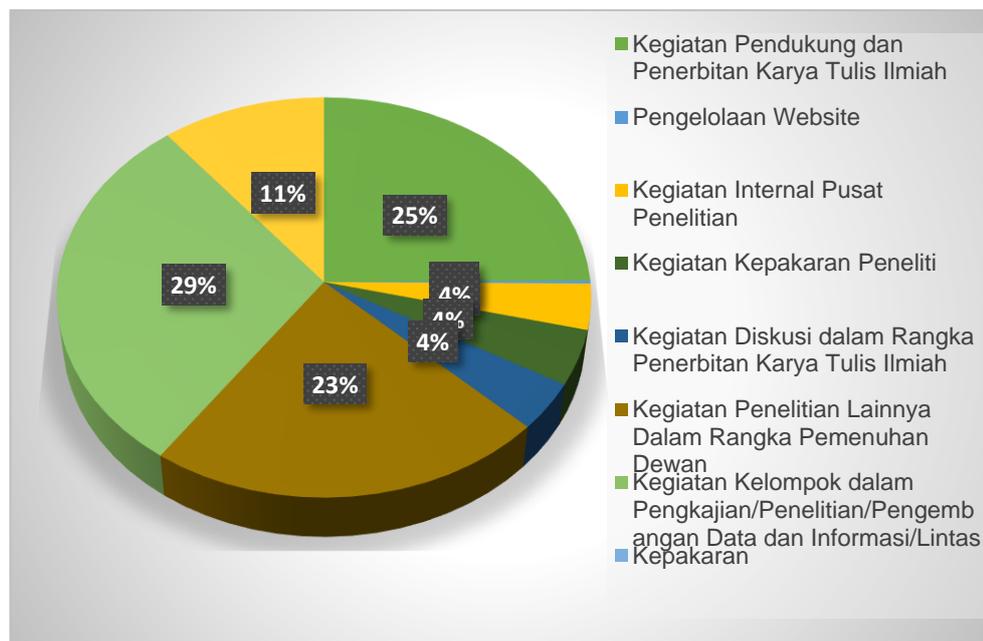
F	Kegiatan Penelitian Lainnya Dalam Rangka Pemenuhan Dewan	1.898.300.000	1.897.368.300	99,95
G	Kegiatan Kelompok dalam Pengkajian/Penelitian/Pengembangan Data dan Informasi/Lintas Kepakaran	2.484.645.000	2.473.152.800	99,54
H	Kegiatan Survei	937.544.000	898.097.000	95,79
Kebijakan Pusat Penelitian		2.019.018.000	1.989.691.511	98,55
A	Rapat Koordinasi	1.936.313.000	1.907.431.511	98,51
B	Penyusunan Laporan Kinerja	82.705.000	82.260.000	99,46
Operasional Penelitian		260.910.000	257.788.850	98,80
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	260.910.000	257.788.850	98,80
Total		10.905.740.000	10.625.191.302	97,43

Sumber: Puslit, 2021.

Pada tabel di atas terlihat bahwa anggaran terbesar adalah anggaran Kegiatan Kelompok dalam Pengkajian/Penelitian/Pengembangan Data dan Informasi/Lintas Kepakaran, yakni sebesar Rp2.484.645.000, diikuti oleh anggaran Kegiatan Pendukung dan Penerbitan Karya Tulis Ilmiah, sebesar Rp2.264.199.000. Pengelolaan *Website* memiliki realisasi anggaran terbesar, yakni 100%, diikuti oleh Kegiatan Penelitian Lainnya Dalam Rangka Pemenuhan Dewan, 99,95% dan Kegiatan Internal Pusat Penelitian, sebesar 99,77%. Kegiatan Pendukung dan Penerbitan Karya Tulis Ilmiah memiliki realisasi terkecil, 92,02%. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya terbitan Jurnal Kajian, yang semula ditargetkan empat terbitan hanya terealisasi dua terbitan dikarenakan kurangnya jumlah penulis.

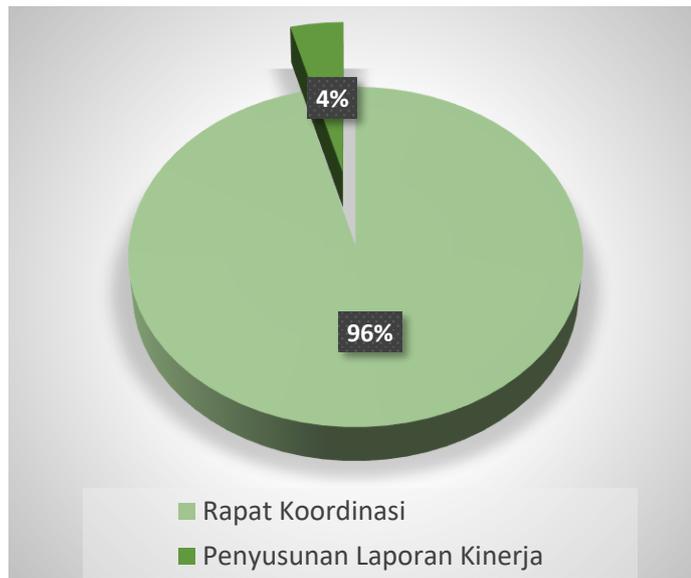
Pada grafik berikut tergambar komposisi anggaran kegiatan pada masing-masing kelompok kegiatan. Kelompok kegiatan Kajian Kedewanan memiliki porsi anggaran terbesar yaitu sebesar 79% (Gambar 25). Gambar 25 menunjukkan komposisi anggaran pada kelompok kegiatan Kajian Kedewanan. Kegiatan Kelompok dalam Pengkajian/Penelitian/Pengembangan Data dan Informasi/Lintas

Kepakaran memiliki porsi anggaran terbesar yaitu sebesar 29%, diikuti oleh Kegiatan Pendukung dan Penerbitan Karya Tulis Ilmiah, sebesar 25%. Kelompok kegiatan Kebijakan Pusat Penelitian hanya memiliki dua jenis kegiatan, kegiatan dengan porsi anggaran terbesar adalah Kegiatan Rapat Koordinasi yakni sebesar 96%. Kelompok kegiatan Operasional Penelitian hanya memiliki satu jenis kegiatan.



Sumber: Puslit, 2021

Gambar 24. Komposisi Anggaran Kajian Kedewanan Tahun 2021



Sumber: Puslit, 2021

Gambar 25. Komposisi Anggaran Kebijakan Pusat Penelitian Tahun 2021

BAB IV PENUTUP



BAB IV. PENUTUP

Kondisi yang terjadi pada Tahun 2021 masih terjadi sebagaimana dialami pada Tahun 2020 yaitu kondisi Pandemi Covid-19. Walaupun telah terjadi penurunan sebaran Pandemi Covid-19 di berbagai daerah, namun kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan di Instansi-instansi pemerintah termasuk Setjen DPR RI. Puslit sebagai salah satu pusat dalam Setjen DPR RI juga perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi tersebut.

Upaya pemulihan kondisi negara karena adanya Covid-19 merupakan tantangan tersendiri bagi Puslit untuk melaksanakan perjanjian kinerja yang telah dikontrakkan di awal tahun 2021. Meskipun telah dilakukan pemotongan anggaran akibat adanya realokasi dan *refocusing* anggaran untuk kepentingan penanggulangan pandemi

Covid-19, dari target kinerja Puslit sepanjang periode Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.905.740.000 Puslit mampu mencapai realisasi kinerja yang tinggi dengan menggunakan anggaran sebesar Rp10.625.191.302 (97,43% dari total anggaran). Puslit tetap mampu mempertahankan kinerjanya dan melaksanakan seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

Laporan kinerja Puslit merupakan bentuk pertanggungjawaban Puslit sebagai organisasi baik berupa pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan/anggaran. Sampai dengan Desember 2021 Puslit telah memenuhi target yang ditetapkan melalui upaya dari segenap unsur fungsional dan struktural yang terdapat di dalamnya, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Adapun target dan realisasi kinerja kegiatan dan anggaran Puslit dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pusat Penelitian Tahun Anggaran 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan	1. Persentase hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, <i>Parliamentary Review</i> , dan Prosiding Seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%
	2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian	3,22	3,27	101,55%
	3. Persentase realisasi anggaran Pusat Penelitian	92,5%	97,43%	105,33%

Sumber: Puslit, 2021.

Dari tahun ke tahun capaian realisasi anggaran Puslit selalu mengalami peningkatan termasuk di tahun 2021, di mana realisasi anggaran Puslit mengalami penurunan sebesar 0,09% dari tahun sebelumnya. Realisasi anggaran puslit selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 14. Dan realisasi kegiatan Puslit tetap 100% seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun ini anggarannya berkurang dari segi nominal, namun hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan di lingkungan Puslit.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Anggaran Pusat Penelitian Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021

Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Capaian (%)
2018	15.162.558.000	13.255.218.310	87,42
2019	14.656.277.000	13.904.082.976	94,87
2020	10.820.521.000	10.552.139.885	97,52
2021	10.905.740.000	10.625.191.302	97,43

Sumber: Puslit, 2021.

Berdasarkan data realisasi kegiatan dan anggaran Puslit masuk kategori memuaskan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dari segi sarana dan prasana maupun SDM. Beberapa kendala yang memengaruhi kualitas kinerja organisasi ini juga perlu diatasi, antara lain (1) ketersediaan

ruang kerja serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan penambahan jumlah peneliti, (2) kurangnya akses ke jurnal *online* berbayar dan akses terhadap lembaga-lembaga lain, terutama lembaga penelitian, (3) belum adanya integrasi *data base* berisi data dan informasi yang sesungguhnya sangat dibutuhkan sebagai bahan kajian peneliti serta sistem kerja yang masih kurang tertata, dan (4) kurangnya dukungan dari segi anggaran maupun kegiatan guna peningkatan inovasi produk layanan, serta kapasitas dan kualitas *skill* dan keilmuan peneliti di lingkungan Puslit.

Untuk itu upaya yang dilakukan Puslit untuk mengatasi kendala tersebut adalah (1) meningkatkan kualitas dan kompetensi peneliti melalui program-program pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun informal, (2) mengupayakan ketersediaan akses dan integrasi terhadap data dan informasi yang lebih luas untuk mendukung kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian dan pengkajian, (3) mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas peneliti dalam memberikan dukungan keahlian, baik kepada AKD maupun unit-unit lain di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, dan (3) mengoptimalkan peran dan fungsi peneliti dalam memberikan bantuan keahlian dengan memperbaiki sistem dan mekanisme kerja peneliti, baik di dalam maupun di luar Puslit.

Laporan kinerja ini sesungguhnya merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang dimiliki Puslit untuk melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditargetkan. Selain itu juga menjadi bahan evaluasi agar kinerja Puslit lebih baik di tahun berikutnya. Melalui laporan kinerja ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dapat melihat potensi dan kendala yang dimiliki Puslit untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja Puslit di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1. Jurnal Ilmiah Terbitan Tahun 2021

1. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (JEKP)

No.	Judul	Penulis
Vol. 12, No. 1, Juni 2021		
1.	<i>Trade Liberalization, Foreign Direct Investment Liberalization, And Wage Inequality In Indonesia</i>	Astriyany dan Shingo Takahashi
2.	<i>The Relationship Between Indonesia's Foreign Direct Investment And Bilateral Intra Industry Trade With Japan, China, And ASEAN-9.</i>	Suhaila Marisa dan Masaru Ichihashi
3.	Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Terhadap Permintaan Cpo Pada Industri Hilir.	Bambang Irawan dan Nining i. Soesilo
4.	<i>Revitalization Of Food Barns To Support Community And National Food Security</i>	Putri Wulansari, Mhd. Rasidin, and Doli Witro
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dan Upah Riil: Analisis Tingkat Provinsi Di Indonesia	Siti Rogayah
6.	Apakah Pemilihan Kepala Daerah Memengaruhi Pola Migrasi Keluar?Bukti Empiris Di Indonesia	Diana Sartika dan vid Adrison
Vol. 12, No. 2, Desember 2021		
1.	Dampak Penerapan Rencana Aksi APEC pada Lima Indikator <i>Ease of Doing Business</i> terhadap Pendirian Usaha di Kawasan APEC	Elsya Yunita dan Nining Indroyono Soesilo
2.	Analisis Kointegrasi Keterbukaan Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Sri Amanda Fitriani, Dedi Budiman Hakim, dan Widyastutik
3.	Mengukur Persistensi Inflasi: Studi Komparasi Delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Setyo Tri Wahyudi, M. Khusaini, dan Rihana Sofie Nabella
4.	Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta	Iwan Hermawan, Izzaty, Eka Budiyanti, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, dan Mohammad Teja

5.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan E-Budgeting dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Pemerintah Aceh	Almuttaqin, Nunung Kusnadi, dan Widyastutik
6.	Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan.	Lukman Nul Hakim, Emma Rochima, dan Santhy Wyantuti

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

2. Jurnal Politica

No	Judul Tulisan	Penulis
Vol. 12, No. 1, Mei 2021		
1.	Understanding Strategies of Anti-Nuclear Movement: A Study of ICAN	Mutti Anggita
2.	Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema anantara Community Policing dan Vigilantisme	Ali Abdullah Wibisono
3.	Peran Internet dalam Meningkatkan Pembangunan Demokrasi di Kawasan Barat Indonesia	Dyah Makutaning Dewi, Dewi Widyawati
4.	Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal	Prayudi
5.	Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan semasa Pemerintahan Joko Widodo	Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari
1.	Understanding Strategies of Anti-Nuclear Movement: A Study of ICAN	Mutti Anggita
Vol. 12, No. 2, November 2021		
1.	Voter Confusion in Surabaya: The Problem of Ballot Design and Incompetence	Aryo Wasisto
2.	Hegemoni dan Ekonomi Politik Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggalih Bayu Muh Kamim
3.	Diplomasi Vaksin Covid-19 dan Budaya Anarki dalam Sistem Internasiona	Ramdhan Muhamin, Rizal A Hidayat, Eldha Mulyani .
4.	From Rational to Irrational Behaviour: The Shift in Indonesian Voting Behaviour After Reformasi Era	Wasisto Raharjo Jati
5.	Gangguan (Disrupsi) terhadap Lembaga Partai Golkar oleh Relawan Politik dalam Pemilu 2019	Arifki
1.	Voter Confusion in Surabaya: The Problem of Ballot Design and Incompetence	Aryo Wasisto

3. Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

3. Jurnal Negara Hukum

No	Judul Tulisan	Penulis
Vol. 12 No. 1, Juni 2021		
1	Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum	Prianter Jaya Hairi
2	Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (<i>Buzzing</i>) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial	R. Muhamad Ibnu Mazjah
3	Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat	Novianto Murti Hantoro
4	Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru	Denico Doly
5	Kebijakan Selektif Keimigrasian terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19	Novianti
6	Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing	Gurnita Ning Kusumawati, Arie Afriansyah
7	<i>Quo Vadis</i> Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan <i>Artificial Intelligence</i> di Beberapa Negara	Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris
8	Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum	Fajar Sugianto, Tomy Michael, Afdhal Mahatta
Vol. 12 No. 2, November 2021		
1	Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum	Prianter Jaya Hairi
2	Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (<i>Buzzing</i>) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial	R. Muhamad Ibnu Mazjah
3	Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat	Novianto Murti Hantoro
4	Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru	Denico Doly
5	Kebijakan Selektif Keimigrasian terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19	Novianti
6	Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing	Gurnita Ning Kusumawati, Arie Afriansyah
7	<i>Quo Vadis</i> Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan <i>Artificial Intelligence</i> di Beberapa Negara	Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris

8	Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum	Fajar Sugianto, Tomy Michael, Afdhal Mahatta
---	---	--

4. Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

4. Jurnal Aspirasi

No.	Judul Tulisan	Penulis
Vol. 12, No. 1, Juni 2021		
1	The Factors Correlate to Family Size in Indonesia	Agung Dwi Laksono, Ratna Dwi Wulandari
2	Profil Sikap Mencari Bantuan Layanan Psikologis pada Mahasiswa	Yohanes Putut Wibhisana
	Nurfadilah Nurfadilah, Anisa Rahmadani, Bahrul Ulum	Rahmi Yuningsih
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo	Sri Nurhayati Qodriyatun
4	Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring	Yohanes Putut Wibhisana
5	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan	Sri Nurhayati Qodriyatun
Vol. 12 No. 2, Desember 2021		
1.	Strategi Komunikasi Krisis DPR RI Menggunakan Instagram Menghadapi Penolakan RUU Cipta Kerja	Indra None Iskandar, Dadang Rahmat Hidayat, Centurion Chandratama Priyatna
2.	Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19	Dinar Wahyuni
3.	Model Hubungan Religiositas dan Dukungan Sosial dengan Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Melalui Mediasi Strategi Koping	Muhaimin Abdillah, Nanik Prihartanti, Eny Purwandari
4.	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Saat Adaptasi Kebiasaan Baru di Pesantren	Anih Sri Suryani
5.	Pengembangan Skala Orientasi Masa Depan Pendidikan pada Remaja Indonesia	
6.	Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional	Sulis Winurini
7.	Model Manajemen Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kepemimpinan Kenabian	Yulia Indahri
8.	Urgensi Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19	Eliana Sari, Mohammad Mulyadi, Durotul Yatimah, Rachmat Maulana, Solihin Solihin

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

5. Jurnal Kajian

No.	Judul Tulisan	Penulis
Vol. 26, No. 1, Tahun 2021		
1.	Pengembangan Sistem Pangan Melalui Penguatan Badan Pangan Nasional	Lukman Adam dan Achmad Suryana
2.	The Patterns of Cabinet Formation in Indonesia: The Case of Yudhoyono and Widodo's Cabinets	Aryo Wasisto
3.	Kemiskinan di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19	Ari Mulianta Ginting
4.	Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan	Aryojati Ardipandanto
5.	Penggunaan E-money Dalam Mewujudkan Cashless Society Pada Masa Pandemi Covid-19	Edmira Rivani dan Eddo Rio
6.	Efektivitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar	Harris Y. P. Sibuea
Vol. 26, No. 2, Tahun 2021		
1.	Surat Suara Pemilih dan Legitimasi Pemilu	Prayudi
2.	Kebijakan Berbasis Bukti dan Ibukota Baru Indonesia	Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katarina
3.	Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Melalui Revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Sali Susiana
4.	Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Barang Impor Melalui Sistem Perekaman di Indonesia	Trias Palupi Kurnianingrum
5.	Perbankan Syariah: Urgensi Penghapusan Unit Usaha Syariah Pada Tahun 2023	Nidya Waras Sayekti dan Sony Hendra Permana

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

Lampiran 2. Buku Terbitan Tahun 2021

Penerbit Intrans Publishing

Jumlah 8 buku yang meliputi:

No.	Judul Buku	Penulis Koordinator	Bidang
1	Kampus Merdeka	A Muchaddam	KS
2	Pancasila Bagi Politik Nasionalisme Inklusif	Prayudi	PDN
3	Perjalanan Bangsa Indonesia menuju Demokrasi	Aryojati	PDN
4	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut	Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.	KS
5	Legislatif Berspektif Gender	Sali Susiana	KS
6	Inovasi Pertanian <i>Startup</i>	Iwan Hernawan	EKP
7	Pilihan Kebijakan dan Tantangan dalam Peningkatan	Mandala Harefa	EKP
8	Desain Keuangan Daerah	Ari Mulianta	EKP

Penerbit Publica Indonesia

Jumlah 7 buku yang meliputi:

No.	Judul Buku	Penulis Koordinator	Bidang
1	Pembangunan Kekuatan Minimum	A. Budiman	PDN
2	Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu	Tim PDN	PDN
3	Tanggung Jawab Negara	Tim Hukum	Hukum
4	Perlindungan Kepentingan Nasional	Tim Hukum	Hukum

5	Pembangkit Tenaga Surya Listrik	Tim EKP	EKP
6	Telisik Daya Tahan Usaha	Tim EKP	EKP
7	Dana Desa dalam Pandemi Covid-19	Sahat	EKP

Penerbit Obor

Jumlah 7 buku yang meliputi:

No.	Judul Buku	Penulis Koordinator	Bidang
1	ASEAN Quo Vadis	Prof. Poltak Partogi	HI
2	Transisi dan Konsolidasi Demokrasi	Prof. Poltak Partogi	HI
3	Reformasi Birokrasi Era Pemerintahan Joko Widodo	Riris Katharina	PDN
4	DPR dan Defisit Demokrasi	Prof. Poltak Partogi dan Riris K	HI
5	Kawasan Industri Halal	Nidya S	EKP
6	Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru	Humphry Wangke	HI
7	Memajukan Industri Keuangan Syariah	Ariesy Tri Mauleny	EKP

Sumber: Pusat Penelitian, 2021

Lampiran 3. Laporan Penelitian Kelompok dan AKD Tahun 2021

1. Laporan Penelitian Kelompok Tahun 2021

Bidang	No.	Keanggotaan Tim	Judul
Hukum	1.	Ketua: Shanti Dwi Kartika Anggota: 1. Novianto M. Hantoro 2. Trias Palupi Kurnianingrum 3. Harris Y.P. Sibuea 4. Denico Doly	Upaya Pemenuhan HAM Bagi Masyarakat Hukum Adat tatas Hak Ulayat melalui Reforma Agraria
	2.	Ketua: Dian Cahyaningrum Anggota: 1. Lutvi Febrika Nola 2. Novianti	Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Investasi
	3.	Ketua: Puteri Hikmawati (Pengganti Lidya Suryani) Anggota: 1. Prianter Jaya Hairi 2. Noverdi Puja	Pengaturan dan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara <i>Online</i> dalam Sistem Peradilan Pidana
	4.	Ketua: Sulasi Rongiyati Anggota: 1. Monika Suhayati 2. Marfuatul Latifah 3. Yosephus Mainake	Aspek Yuridis Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM
PDN	5.	Ketua: Debora Sanur Lindawaty Anggota: 1. Prayudi 2. Juniar Laraswanda Umagapi 3. Aryo Wasisto	Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara
	6.	Ketua: Ahmad BUdiman Anggota: 1. Aryojati Ardipandanto 2. Siti Chaerani Dewanti 3. Aulia Fitria	Tantangan Penyelenggaraan Penyiaran Multiplatform di Indonesia

	7.	Ketua: Dewi Sendhikasari Anggota: 1. Riris Katharina 2. Sidiq Budi Sejati 3. Anin Dhita Kiky Amrynudin	Peran Satu Data Indonesia dalam Penanganan Covid-19
KS	8.	Ketua: Mohammad Mulyadi Anggota: 1. Prof Ujjianto Singgih 2. Budi Rohani 3. Sali Susiana 4. Tri Rini	Modal Sosial dan Penanganan Pandemi Covid-19
	9.	Ketua: Anih Sri Suryani Anggota: 1. Sri Nurhayati Qodriyatun 2. Teddy Prasetiawan 3. Mohammad Teja	Implementasi Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Makanan
	10.	Ketua: Sulis Winurini Anggota: 1. Lukman Nul Hakim 2. Dinar Wahyuni 3. Nur Sholikah Putri Suni 4. Hartini Retnaningsih	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia
	11.	Ketua: Achmad Muchaddam F. Anggota: 1. Yulia Indahri 2. Elga Andina 3. Fieka Nurul Arifa 4. Rahmi Yuningsih	Pendidikan Pesantren pada Masa Pandemi Covid-19: Potret Pembelajaran Tatap Muka dan Penerapan Protokol Kesehatan di Pesantren
HI	12.	Ketua: Poltak Partogi Nainggolan Anggota: 1. Sita Hidriyah 2. Lisbet	Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Masa Pemerintahan Donald Trump (2016-2020)

	13.	Ketua: Humphrey Wangke Anggota: 1. Simela Victor Muhammad 2. Rizki Roza 3. Ziyad Falahi	Implementasi <i>Sustainable Ocean Solution</i> dalam Kebijakan Kelautan Indonesia
EKP	14.	Ketua: Sony Hendra Permana Anggota: 1. Rais Agil Bahtiar 2. Masyithah Aulia Adhiem 3. Hariyadi	Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19
	15.	Ketua: Sahat Aditua Silalahi Anggota: 1. Eka Budiyantri 2. Teuku Ade Surya 3. Achmad Sani Alhusain 4. Juli Panglima Saragih	Strategi Pengembangan BUMDes dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Desa
	16.	Ketua: Mandala Harefa Anggota: 1. Yuni Sudarwati 2. Niken Paramita Purwanto 3. Burhanudin Mukhamad Faturahman	Strategi Pemulihan Sektro Pariwisata di Masa Pandemi Covid
	17.	Ketua: Ari Mulianta Ginting Anggota: 1. Edmira Rivani 2. Dewi Restu Mangeswuri 3. Rasbin 4. Venti Eka Satya	Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Mendukung Perekonomian Daerah
	18	Ketua: Nidya Waras Sayekti Anggota: 1. Ariesy Tri Mauleny 2. Lisnawati 3. Izzaty	Strategi Pembentukan Kawasan Industri Halal Sebagai Upaya Mewujudkan Ekosistem Halal

	19	Ketua: Dewi Wuryandani Anggota: 1. Hilma Meilani 2. Iwan Hermawan 3. Rafika Sari	Dampak Program Bantuan Sosial Tunai Covid terhadap Konsumsi dan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan
--	----	--	---

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

2. Laporan Penelitian Berdasarkan Permintaan AKD Tahun 2021

No.	Anggota	Judul
1.	Ketua: Ahmad Budiman Anggota: 1. Aryojati Ardipandanto 2. Aulia Fitri 3. Siti Chaerani Dewant 4. Luthvi Febryka Nola 5. Trias Palupi Kurnianingrum	Urgensi Pengaturan Transfer Data Pribadi dan Otoritas Pelindungan Data Pribadi
2.	Ketua: Simela Victor Muhammad Anggota: 1. Humphry Wangke 2. Sita Hidriyah 3. Rizki Roza 4. Ziyad Falahi	Urgensi Peningkatan Kemampuan Pengawasan Wilayah Maritim Indonesia
3.	Ketua: Riris Katharina Anggota: 1. Dewi Sendhikasari Dharmaningtias 2. Anin Dhita Kiky Amrynudin	Analisis Dampak Terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4.	Ketua: Prayudi Anggota 1. Debora Sanur Lindawaty, 2. Aryo Wasisto 3. Juniar Laraswanda Umagapi	Penyelenggara Pemilu Sebagai Bagian Demokrasi Yang Substansi
5.	Ketua: Puteri Hikmawati 1. Lidya Suryani Widayati 2. Prianter Jaya Hairi 3. Marfuatul Latifah 4. Noverdi Puja Saputra	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam UU ITE
6.	Ketua: Iwan Hermawan Anggota: 1. Mandala Harefa, 2. Drs. Juli Panglima Saragih 3. Eka Budiyantri 4. Lisnawati 5. Izzaty,	Kebijakan Pupuk Bersubsidi: Isu tentang Distribusi Pupuk dan Implementasi Kartu Tani

7.	<p>Ketua Sri Nurhayati Qodriyatun</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anih Sri Suryani 2. Dian Cahyaningrum 3. Masyithah Aulia Adhiem 4. Lisbet 	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8.	<p>Ketua: Harris Y.P. Sibuea</p> <p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Novianto Murti Hantoro 2. Denico Doly 3. Shanti Dwi Kartika 4. Monika Suhayati 	Implementasi Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
9.	<p>Ketua: Rohani Budi Prihatin</p> <p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulasi Rongiyati 2. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi 3. Achmad Sani Alhusain 4. Mohammad Mulyadi 5. Mohammad Teja 	Perspektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kebijakan Transportasi Berbasis Online
10.	<p>Ketua: Dewi Restu Mangeswuri</p> <p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ariesy Tri Mauleny. 2. Nidya Waras Sayekti 3. Rafika Sari 4. Niken Paramita Purwanto 5. Sony Hendra Permana. 	Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bagi BUMN Dan UMKM
11.	<p>Ketua: T. Ade Surya</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hariyadi 2. Hilma Meilani 3. Dewi Wuryandani 4. Teddy Prasetiawan 5. Poltak Partogi Nainggolan 	Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Wilayah Terdepan, Tertinggal,
12.	<p>Ketua: Sali Susiana</p> <p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujjianto Singgih P. 2. Achmad Muchaddam 3. Lukman Nul Hakim 4. Sidiq Budi Sejati 	Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta)

13.	<p>Ketua: Hartini Retnaningsih</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Rini Puji Lestari 2. Nur Sholikhah Putri Suni 3. Rahmi Yuningsih 4. Yuni Sudarwati 5. Novianti 	<p>Optimalisasi Pengembangan Energi Peredaran Obat Dan Makanan Melalui <i>E-Commerce</i> Serta Peran BPOM dalam Melakukan Fungsi Pengawasan: Perspektif Kesehatan, Sosial, Hukum, Dan Ekonomi (Studi di Kota Serang, Provinsi Banten dan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)</p>
14.	<p>Ketua: Dinar Wahyuni</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulis Winurini, 2. Yulia Indahri 3. Fieka Nurul Arifa 4. Elga Andina 5. Burhanudin Mukhamad Faturahman 	<p>Manajemen Guru Honoror: Sistem Rekrutmen dan Pengawasan</p>
15.	<p>Ketua: Rasbin</p> <p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ari Mulianta Ginting 2. Venti Eka Satya 3. Edmira Rivani 4. Rais Agil Bahtiar 	<p>Road Map Pembiayaan Utang Jangka Menengah dan Strategi Penurunan Pembiayaan dari Utang dalam Terwujudnya Kestinambungan Fiskal</p>

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

3. Laporan Penelitian Survei Tahun 2021

No.	Anggota	Judul
1.	Ketua: Iwan Hermawan Anggota: 1. Aryojati Ardipandanto 2. Aulia Fitri 3. Siti Chaerani Dewant 4. Luthvi Febryka Nola 5. Trias Palupi Kurnianingrum 6. Simela Victor Muhamad 7. Lukman Adam 8. Juli Panglima Saragih 9. Lukman Nul Hakim 10. Ujjianto Singgih P. 11. Ahmad Budiman 12. Anih Sri Suryani 13. Rahmi Yuningsih 14. Denico Doly 15. Teddy Prasetiawan 16. Masyithah Aulia Adhiem 17. Hartini Retnaningsih 18. Dewi Wuryandani 19. Yuni Sudarwati 20. Dinar Wahyuni 21. Sulis Winurini 22. Rizki Roza 23. Puteri Hikmawati 24. Sulasi Rongiyati 25. Monika Suhayati 26. Sony Hendra Permana 27. Novianti 28. Sita Hidriyah 29. Luthvi Febryka Nola 30. Hariyadi 31. Rohani Budi Prihatin 32. Noverdi Puja Saputra 33. Anin Dhita Kiky Amrynudin 34. Yosephus Mainake 35. Achmad Sani Alhusain 36. Lisnawati	Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2019- 2024

<p>37. Eka Budiyantri 38. Niken Paramita Purwanto 39. Dian Cahyaningrum 40. Juniar Laraswanda Umagapi 41. Rais Agil Bahtiar 42. Prayudi 43. Achmad Muchaddam F. 44. Sidiq Budi Sejati 45. Mandala Harefa 46. Rafika Sari 47. Mohammad Mulyadi 48. Sali Susiana 49. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi 50. Ariesy Tri Mauleny 51. Nidya Waras Sayekti 52. T. Ade Surya 53. Novianto Murti Hantoro 54. Prianter Jaya Hairi 55. Mohammad Teja 56. Harris Yonatan Parmahan Sibuea 57. Edmira Rivani 58. Ari Mulianta Ginting 59. Rasbin 60. Venti Eka Satya 61. Debora Sanur Lindawaty 62. Marfuatul Latifah 63. Dewi Sendhikasari D.</p>	
--	--

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

Lampiran 4. Info Singkat Terbitan Tahun 2021

No.	Judul Tulisan	Penulis
Vol.XIII, No.1//Puslit/Januari/2021		
1.	Penerapan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Kasus Penyebaran Video Asusila	Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
2.	Diplomasi Vaksin Indonesia untuk Kesehatan Dunia	Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
3.	Permasalahan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang Memberatkan Masyarakat	Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
4.	Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Positif Tahun 2021 di Tengah Pandemi Covid-19	Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
5.	Komunikasi Digital Pasca Musibah Penerbangan Sriwijaya Air SJ-182 PK-CLC	Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.
Vol.XIII, No.2//Puslit/Januari/2021		
6.	Prolegnas sebagai Instrumen Perencanaan dan Potret Politik Hukum Nasional	Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
7.	Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Israel dan Perebutan Pengaruh Global	Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
8.	Urgensi Membangun Masyarakat Sadar Bencana	Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.
9.	Pengaturan Sistem Pembayaran Digital untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia	Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
10.	Menata Ulang Desain Kecerentakan Pileg, Pilpres, dan Pilkada	Aryojati Ardipandanto, S.IP.
Vol.XIII, No.3//Puslit/Februari/2021		
11.	Peran Pam Swakarsa dalam Lingkup Fungsi Kepolisian sebagai Upaya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
12.	Arah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Presiden Joe Biden	Lisbet, S.Ip., M.Si.
13.	Tingginya Kasus Aktif dan Angka Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia	Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.
14.	Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional	Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
15.	Data Kependudukan dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	Dewi Sendhikasari Dharmaningias, S.IP., MPA
Vol.XIII, No.4//Puslit/Februari/2021		
16.	Perspektif Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda	Novianti, S.H., M.H.
17.	Kudeta Militer di Myanmar: Ujian bagi ASEAN	Rizki Roza, S.Ip., M.Si.
18.	Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19	Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

19.	Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si.
20.	TNI-Polri dan Program Vaksinasi Nasional	Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)
Vol.XIII, No.5/II/Puslit/Maret/2021		
21.	Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE	Monika Suhayati, S.H., M.H.
22.	Isu Laut China Selatan: Ekspansi China dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi	Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
23.	Urgensi Pengaturan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan	Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
24.	Peningkatan Alokasi Anggaran PEN Tahun 2021 dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi	Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
25.	Otoritas Pengawas Pelindungan Data Pribadi	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Vol.XIII, No.6/II/Puslit/Maret/2021		
26.	Pelindungan Hukum terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia	Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.
27.	Krisis Politik Myanmar dan Intervensi ASEAN	Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.
28.	<i>Green Energy</i> dan Target Pengurangan Emisi	Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.
29.	Polemik Kebijakan Impor Beras Tahun 2021	T. Ade Surya, S.T., M.M.
30.	Dampak Batalnya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Vol.XIII, No.7/II/Puslit/April/2021		
31.	<i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> dan Permasalahannya	Noverdi Puja Saputra, M.H.
32.	Arah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Joseph Biden	<ul style="list-style-type: none"> • Prof.Dr.phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. • Ziyad Falahi, M.Si.
33.	Kontroversi Penghapusan FABA dari Daftar Limbah B3	Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
34.	Prospek Peningkatan Pariwisata Domestik di Tengah Pandemi Covid-19	Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.
35.	Keberlanjutan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru pada Masa Pandemi	Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Vol.XIII, No.8/II/Puslit/April/2021		
36.	<i>Judicial Review</i> Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja	Yosephus Mainake, M.H.
37.	Israel dan Program Nuklir Iran	Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
38.	Menelisik Relasi Perawat dan Klien	Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
39.	Revisi Proyeksi Pertumbuhan dan Momentum Pemulihan Ekonomi Tahun 2021	Mandala Harefa, S.E., M.Si.
40.	Skenario Pemilu 2024 dan Konsekuensinya	Drs. Prayudi, M.Si.
Vol.XIII, No.9/II/Puslit/Mei/2021		

41.	Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan	Denico Doly, S.H., M.Kn.
42.	Meningkatnya Aksi-Aksi Rasis terhadap Warga Keturunan Asia di Amerika Serikat	Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
43.	Olimpiade Tokyo di Tengah Pandemi Covid-19: Belajar dari Kasus All England	Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., M.A.
44.	Prospek Sektor Manufaktur dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.
45.	Urgensi Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia	Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.
Vol.XIII, No.10/II/Puslit/Mei/2021		
46.	Pengendalian Tenaga Kerja Asing pada Masa Pandemi Covid-19	Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.
47.	Konflik Terbuka Palestina-Israel dan Pentingnya Menghidupkan Kembali Perundingan Damai	Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
48.	Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021	Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
49.	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Solusinya	Rais Agil Bahtiar, S. S., M.Si.
50.	Ambiguitas Kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Juniar Laraswanda Umagapi, M. A. • Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Vol.XIII, No.11/II/Puslit/Juni/2021		
51.	Urgensi Sinergitas Pengaturan Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber Nasional	Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
52.	Pencegatan Pesawat Militer China Oleh Malaysia: Tantangan Baru bagi Kawasan?	Rizki Roza, S.Ip., M.Si.
53.	Menuju Nett Zero Emissions Indonesia 2070	Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
54.	Peningkatan Porsi Energi Hijau pada RUPTL 2021-2030	Burhanudin Mukhamad Faturahman, S. A. P., M. A. P.
55.	SAPK: Dapatkah Efektif Memperbaiki Data Kepegawaian?	<ul style="list-style-type: none"> • Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP. • Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA
Vol.XIII, No.12/II/Puslit/Juni/2021		
56.	Reformulasi Norma Penghinaan Presiden dalam RKUHP	Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
57.	Perkembangan Krisis Myanmar Pasca-ASEAN Leaders' Meeting	Lisbet, S.Ip., M.Si.
58.	Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas	Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
59.	Mengkaji Wacana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Jasa Pendidikan	Lisnawati, S.Si., M.S.E.

60.	Sinergitas Kewenangan Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Menjaga Mutu Siaran	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Vol.XIII, No.13/II/Puslit/Juli/2021		
61.	Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali	Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.
62.	Pandemi Covid-19 Sebagai Persoalan Serius Banyak Negara di Dunia	Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
63.	<i>Burn Out</i> Tenaga Kesehatan Indonesia Selama Pandemi	Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.
64.	Strategi Penanganan Covid-19 dan Perubahan Anggaran PEN 2021 dalam Mendukung PPKM Darurat	Hilma Meilani, S.T., MBA.
65.	Isu Jabatan Presiden Tiga Periode dan Evaluasi Kinerja Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> • Aryo Wasisto, M.Si. • Drs. Prayudi, M.Si.
Vol.XIII, No.14/II/Puslit/Juli/2021		
66.	Kebijakan Bebas Visa Kunjungan saat Pandemi Covid-19	Marfuatul Latifah, S.H.I., LI.M.
67.	Seabad Partai Komunis China dan Masa Depan China	<ul style="list-style-type: none"> • Ziyad Falahi, M.Si. • Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
68.	Peran Pendidikan dalam Mewujudkan “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”	Fieka Nurul Arifa, M.Pd.
69.	Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. • Anin Dhita Kiky Amryudin, S.A.P., M.Si.
70.	-	-
Vol.XIII, No.15/II/Puslit/Agustus/2021		
71.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining	Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M.
72.	Kerja Sama Internasional Mengatasi Perubahan Iklim	Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
73.	Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
74.	Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Pandemi Covid-19	Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.
75.	Kebijakan Pemerintah terhadap Terorisme di Poso	Aryojati Ardipandanto, S.IP.
Vol.XIII, No.16/II/Puslit/Agustus/2021		
76.	Perluakah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik?	Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
77.	Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan	Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
78.	Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19	Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.
79.	Tantangan dan Strategi RAPBN 2022 dalam Merespons Ketidakpastian	Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.
80.	Urgensi Pembenahan Sistem Keamanan Siber Pemerintah	Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Vol.XIII, No.17/II/Puslit/September/2021		
81.	Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal	Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
82.	Makna Kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Ke Singapura Dan Vietnam Bagi Asia Tenggara	Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.
83.	Perlindungan Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19	Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.
84.	Upaya Melanjutkan Momentum Positif Pertumbuhan Perekonomian Nasional Melalui Kebijakan Sisi Permintaan	Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., MBA
85.	Rencana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Juniar Laraswanda Umagapi, M. A. • Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Vol.XIII, No.18/II/Puslit/September/2021		
86.	Upaya Pencegahan Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan oleh Kepala Daerah	Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
87.	Penguatan Hubungan Indonesia-Australia untuk Kepentingan Strategis di Indo-Pasifik	Rizki Roza, S.Ip., M.Si.
88.	Pajak Karbon sebagai Instrumen Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia	Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
89.	Manfaat dan Risiko dari Kerja Sama Antara Perbankan dan Fintech	Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
90.	Pentingnya Pengawasan Vaksinasi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP. • Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA
Vol.XIII, No.19/II/Puslit/Oktober/2021		
91.	Pro Kontra Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 terkait Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi	Novianti, S.H., M.H.
92.	Rudal Hipersonik Korea Utara dan Ancamannya terhadap Keamanan Kawasan	Lisbet, S.Ip., M.Si.
93.	Peran Guru dalam Pemulihan Pendidikan Pascapandemi dan Tantangannya	Fieka Nurul Arifa, M.Pd.
94.	Telisik Pandora Papers	DR. Iwan Hermawan, S.P., M.Si.
95.	-	-
Vol.XIII, No.20/II/Puslit/Oktober/2021		
96.	Politik Hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
97.	Konflik China-Taiwan dan Respons Amerika Serikat	Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.
98.	Pengelolaan Food Loss And Waste dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan	Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.
99.	Reformasi Perpajakan dan Pemberlakuan Pajak Karbon Melalui UU Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Dewi Wuryandani, S.T., M.M. • Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

100.	Polemik Jadwal Pemungutan Suara dan Kualitas Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. Prayudi, M.Si. • Aryo Wasisto, M.Si.
Vol.XIII, No.21/II/Puslit/November/2021		
101.	Polemik Kewenangan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi	Yosephus Mainake, M.H.
102.	Upaya ASEAN Menekan Myanmar	<ul style="list-style-type: none"> • Ziyad Falahi, M.Si. • Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
103.	Fenomena Wisata "Balas Dendam": Peluang dan Risiko	Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.
104.	Presidensi G-20 Tahun 2022 dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia	Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.
105.	Transparansi Anggaran Reses dan Kepercayaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Anin Dhita Kiky Amryudin, S.A.P., M.Si. • Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Vol.XIII, No.22/II/Puslit/November/2021		
106.	Dampak Diterbitkannya Pedoman Kejaksaan Mengenai Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	Noverdi Puja Saputra, M.H.
107.	Tanggung Jawab Negara Maju Terhadap Dana Iklim	Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
108.	Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
109.	Mitigasi Penyelamatan Garuda Indonesia Melalui Restrukturisasi	Rafika Sari, S.E., M.S.E.
110.	Wacana Pengisian Jabatan Wakil Panglima TNI	Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)
Vol.XIII, No.23/II/Puslit/Desember/2021		
111.	Pemberantasan Mafia Tanah	Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.
112.	Krisis Imigran Ilegal Dan Konflik Perbatasan Polandia Versus Belarus	Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
113.	Sistem "Jemput Bola" Percepatan Vaksinasi Covid-19	Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
114.	Tekanan Pendanaan Implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia Pasca-Pakta Glasgow	Dr. Hariyadi, S.IP., MPP
115.	Pelindungan Data Pribadi Pada Transfer Data Pribadi Pinjaman Online	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Vol.XIII, No.24/II/Puslit/Desember/2021		
116.	Isu Nuklir dalam Hubungan Israel - Iran	Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
117.	Pelibatan Kelompok Rentan dalam Pengurangan Risiko Bencana	Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
118.	Membangun Ekosistem Digital bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.
119.	Pengelolaan Ormas secara Demokratis	Drs. Prayudi, M.Si.

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

Lampiran 5. *Parliamentary Review* Terbitan Tahun 2021

Edisi	Judul	Penulis
Vol. III, No. 1, Maret 2021 Topik utama: “Bencana dan Permasalahannya”		
1.	Pemahaman, Kebertahanan, dan Respons Masyarakat Lokal terhadap Bencana	Ujiyanto Singgih Prayitno
2.	Perluakah Sanksi bagi Orang yang Menolak Divaksin Covid-19?	Puteri Hikmawati
3.	Relasi Antar-Lembaga Pemerintahan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia	Riris Katharina
4.	Revisi Sisi Ekonomi Undang-Undang Penanganan Bencana	Hariyadi
5.	Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Peningkatan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Risiko Bencana	Humphrey Wangke
Vol. II, No. 2, Juni 2021 Topik utama: “Pemindahan Ibu Kota Negara”		
1.	Pendidikan Bermutu dan Pembelajaran Tatap Muka Pasca-Setahun Covid-19	Yulia Indahri dan Hartini Retnaningsih
2.	Penguatan Legislasi Pelindungan Data Pribadi Konsumen dalam Penanganan Covid-19	Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati
3.	Peran Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi pada Penanganan Covid-19	Debora Sanur Lindawaty Dan Ahmad Budiman
4.	Penguatan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021 di Tengah Pandemi Covid-19	Achmad Sani Alhusain
5.	Kemungkinan Pecahnya Konflik Militer Terbuka di Laut China Selatan	Poltak Partogi Nainggolan
Vol. III, No. 3, September 2021 Topik utama: “Demokrasi, Keselamatan Warga, dan Pemulihan Ekonomi dan Krisis”		
1.	Beban Penyelenggara dan Penyederhanaan Pemilu 2024	Prayudi
2.	Dampak Hukum Alih Status Kepegawaian KPK	Novianti
3.	Menciptakan Stabilitas Myanmar demi Menjaga Stabilitas Kawasan Asia Tenggara	Poltak Partogi Nainggolan
4.	Kepatuhan Masyarakat terhadap PPKM sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19 di Indonesia	Tri Rini Puji Lestari
5.	Kebijakan Fiskal dalam Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19	Mandala Harefa
Vol. III, No. 4, Desember 2021 Topik utama: “Perlindungan Warga Negara, Keamanan dan Pemulihan Ekonomi”		
1.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	Sali Susiana
2.	Pelindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual	Puteri Hikmawati
3.	Kedaulatan Digital Daerah 3T di Indonesia	Ahmad Budiman

4.	Strategi Memajukan BUMN: Privatisasi versus Konsolidasi (Holdingsasi)	Juli Panglima Saragih
5.	Tantangan ASEAN Mewujudkan Stabilitas Keamanan di Kawasan dalam Kerangka Kerja Sama Indo-Pasifik	Simela Victor Muhamad

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

Lampiran 6. Web Seminar Pusat Penelitian pada Tahun 2021

No.	Tanggal	Judul/Tema	Pembicara
1.	4 Maret 2021	Quo Vadis RUU Pemilu	<p><i>Keynote Speech:</i> Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung (Ketua Komisi II DPR RI)</p> <p>Pembicara:</p> <p>Dra. Mudyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D.(Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik UNPAD)</p> <p>Drs. Prayudi, M.Si. (Peneliti Utama Badan Keahlian Setjen DPR RI)</p> <p>Titi Anggraini, S.H., M.H. (Dewan Pembina Perludem)</p> <p>Moderator: Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si. (Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP UNPAD)</p>
2.	29 Juli 2021	Evaluasi PPKM Darurat dalam Perspektif Kesehatan, Sosial, Ekonomi, dan Hukum	<p><i>Keynote Speech:</i> Felly Estelita Runtuwene, SE. (Ketua Komisi IX DPR RI)</p> <p>Pembicara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc. (Fakultas Kesehatan Masyarakat UI) 2. Dr. Imam B. Prasodjo, M.A. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI) 3. Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM) 4. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H (Fakultas Hukum UI) <p>Moderator:</p> <p>Bernardus Emmanuel Satrio, S.Sos., M.Si (Peneliti Litbang Kompas)</p>

3.	13 Oktober 2021	Urgensi Pembangunan Satu Data Indonesia	<p><i>Keynote Speech:</i> H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M (Ketua BURT & Anggota Komisi II DPR RI)</p> <p>Pembicara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Widyawan, M.Sc., Ph.D. (Univeristas Gajah Mada) 2. Dr. Mardhani Riassetiawan, SE Ak, M.T. (Universitas Gajah Mada) <p>Moderator: Dr. Rohani Budi Prihatin, M.Si. (Peneliti Madya Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)</p>
4.	28 Oktober 2021	Pembangunan Pusat Data Analitik Setjen DPR RI	<p><i>Keynote Speech:</i> Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si. (Wakil Ketua BURT dan Anggota Komisi III DPR RI)</p> <p>Pembicara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Batam 2. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi (PDSI) BP Batam 3. Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam) <p>Moderator: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., M.A. (Peneliti Muda Badan Keahlian Setjen DPR RI)</p>

Sumber: Pusat Penelitian, 2021.

TIM PENYUSUN

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Sali Susiana, S.Sos., M.Si.
Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
Dewi Wuryandani, S.T., M.M.
Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Rafika Sari, S.E., M.S.E.
Denico Doly, S.H., M.Kn.
Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Marfuatul Latifa, S.H.I, L.LM.
Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

